

Agih Si Belem Genep *Singe Munge*

**Cukup
Sudah**

JANGANLAH SAMPAI
TERJADI LAGI

**Jejak
Damai**

DAN REKONSILIASI
DI SEDIE JADI



Agih Si Belem Genep, Singe Munge

Cukup Sudah, Janganlah Sampai Terjadi Lagi
Jejak Damai Dan Rekonsiliasi Di Sedie Jadi

KontraS Aceh

Agih Si Belem Genep, Singe Munge

Cukup Sudah, Janganlah Sampai Terjadi Lagi
Jejak Damai Dan Rekonsiliasi Di Sedie Jadi

Penulis

Nashrun Marzuki

Kontributor

Azharul Husna

Hendra Saputra

Faisal Hadi

Fuadi Mardhatillah

Suterisno

Fauzan Azima

Ilustrasi dan Tata Letak

Rifqi Maulana

Allyca Putri Anjani

Diterbitkan oleh Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak
Kekerasan (KontraS) Aceh bekerja sama dengan Asia Justice and Rights
(AJAR)

Jl. Mujur No.98A, Lam Lagang, Kec. Banda Raya,
Kota Banda Aceh, Aceh 23239

Secangkir Kopi

Ingatan Silaturahmi Kebangsaan

Awal tahun 2000-an, kancah konflik bergeser dari kawasan pesisir utara masuk ke wilayah tengah Aceh. Sejak itu, situasi Tanoh Gayo yang meliputi Aceh Tengah dan Bener Meriah berubah, dari yang dulunya kawasan paling tenang, sontak menjadi arena pertempuran antara gerilyawan Gerakan Aceh Merdeka dengan pasukan militer Indonesia, yang menelan banyak korban dari warga sipil.

Relasi sosial yang semula harmonis di tengah masyarakat Gayo yang dihuni tiga suku dominan: Gayo, Aceh dan Jawa, pun berubah akibat situasi konflik sehingga memicu benturan horizontal di antara mereka. Hal ini tak lepas dari rentetan peristiwa kekerasan yang menimpa penduduk suku Jawa oleh sekelompok pasukan GAM di sana. Imbasnya, deretan aksi-aksi saling serang terus meletup di berbagai tempat.

Salah satunya terjadi di Desa Sedie Jadi, yang dulunya bernama Kampung Kresek. 5 Juni 2001, terjadi peristiwa berdarah di Kampung Kresek. Pasukan GAM menerobos masuk ke desa ini dan membakar rumah-rumah penduduk. Dalam insiden ini, lima orang tewas, termasuk diantaranya seorang anak berusia dua tahun. Peristiwa ini menjadi momentum paling menentukan bagi eskalasi konflik antara gerilyawan GAM dan pasukan milisi di kawasan Gayo kala itu. Insiden ini kelak merembet ke banyak peristiwa kekerasan horizontal lainnya, yang dilatari sentimen etnis. Dalam peta konflik Gayo, Kresek dikenal sebagai kawasan basis terkuat front perlawanan terhadap GAM.

Meski perdamaian antara GAM dan Pemerintah RI secara resmi telah ditorehkan pada 15 Agustus 2005, namun hal itu tak serta merta memulih-

kan secara utuh relasi sosial masyarakat akar rumput di Gayo, yang kadung terdampak konflik antar masyarakat sebelumnya. Meski tak ada lagi deru senjata, konflik telah memberi bekas stigma kepada masing-masing kelompok masyarakat di sana, yang tak sepenuhnya lekang meski dilintasi waktu yang panjang. Stigma ini menjadikan hubungan mereka begitu dingin.

Untuk menyudahi kebekuan itu, terbersit sebuah niatan pada masing-masing pihak yang dulunya berseteru. Salah satu ikhtiar yang ditempuh, yakni upaya merajut kembali kohesi sosial yang pernah terputus dulu melalui rekonsiliasi komunitas dengan mempertemukan para pihak yang pernah mengambil peran pada saat konflik.

Pertemuan para pihak ini didasari niat untuk sama-sama membangun dan merawat perdamaian agar tetap langgeng, serta yang terpenting, memutus mata rantai konflik kekerasan supaya tidak berulang lagi kepada anak cucu mereka ke depan. Pada saatnya, penting bagi masyarakat di Gayo menentukan titik untuk menyudahi riwayat panjang kekerasan yang mereka alami.

Dalam beberapa tahun, ikhtiar ini disahuti dengan lapang. Langkah ini diawali dengan konsolidasi secara terpisah ke masing-masing pihak yang dulunya terlibat dalam peristiwa di Kresek. Di sini, kebenaran terus ditelusuri. Tak mudah memang, pun butuh waktu yang tidak sebentar untuk meyakinkannya. Ibarat luka yang perlu sejenak dikuak, masing-masing pihak akan terbawa pada ingatan saat kekerasan itu merebak, dan ini tentu amat menyakitkan.

Lantas apa yang paling berharga dalam proses pengakuan ini? Yakni, ketika setiap kali ada rintih karena ingatan silam itu, maka para pihak akan kembali bersandar pada niatan awal, bahwa damai adalah pembelajaran paling penting dari sebuah konflik panjang, dan perlu mereka torehkan agar luka itu tak lagi diwariskan kepada generasi berikutnya.

Setelah berkonsolidasi, lalu berlanjut dengan pertemuan untuk menemukan kata sepakat hingga masing-masing pihak yang terlibat bisa saling memaafkan atas peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Persaudaraan perlu dirajut kembali.

Pada 29 Maret 2022, pertemuan rekonsiliasi atas Peristiwa Kresek dihelat. Mengusung tema “Silaturrahi Kebangsaan”, kegiatan ini bagian pelaksanaan mandat pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi KKR Aceh melalui kerja sama dengan KontraS Aceh yang turut difasilitasi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

Pada akhirnya, kesepakatan antara para pihak tersebut sangat penting untuk diketahui publik secara luas dengan harapan dapat menginspirasi terban- gunnya upaya-upaya serupa di tempat lain di Aceh, dan Indonesia pada umumnya. Selain menjadi rekonsiliasi perdana di Indonesia, momentum ini berupaya mengusik negara untuk belajar kembali dari Aceh. Di saat otoritas lamban dalam menyelesaikan konflik di masa lalu, maka solidaritas korban di akar rumput akan terus lantang menuntut tanggung jawab negara agar memulihkan hak-hak mereka. Terlebih lagi, jika berkaca dalam satu dasawarsa terakhir, wacana KKR di tingkat nasional terus saja menuai atensi, meski negara masih bergeming.

Dari Kampung Sedie Jadi, ikrar damai digaungkan. Mereka yang dulunya saling seteru, kini bersalaman dan duduk bersama. Bagi KontraS Aceh, segala suka duka di sepanjang proses menuju rekonsiliasi ini penting untuk ditulis kembali dan disebarakan kepada publik secara luas. Cerita ini, adalah ikhtiar untuk melawan lupa.

Azharul Husna
Koordinator KontraS Aceh

Daftar Isi

- i** Secangkir Kopi
- iv** Daftar Isi
- 1** Siapa yang Memainkan Isu Sara Di Aceh Tengah
- 10** Peristiwa itu Malam Purnama Berdarah 5 Juni 2001
- 29** Memikat Merpati Putih Terbang Pulang
- 38** Merpati Putih Nyaris Gagal Terbang Pulang
- 51** Setelah Merpati Memebuat Sarang

Pendahuluan

Siapa yang Memainkan Isu Sara *Di Aceh Tengah*



Siapa mainkan isu SARA di Aceh Tengah

Tanah Gayo, dataran tinggi nan subur dan indah di jantung Provinsi Aceh. Ini adalah daerah sasaran utama Belanda di abad ke-18, saat mencari wilayah yang dapat ditanami komoditas tanaman keras. Penaklukan Tanah Gayo yang ditandai dengan Ekspedisi Van Dalen, berlangsung antara akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19, diwarnai kesumba darah serta penuh limpahan air mata.

Foto-foto mengerikan dari metode keji yang digunakan pasukan Belanda untuk menghabisi rakyat Gayo, dewasa ini menjadi sumber kritik keras para pejuang hak asasi manusia. Sampai sekarang, ingatan tentang prosesi penaklukan itu kekal menjadi lembaran hitam dalam sejarah Aceh, khususnya sejarah Gayo.

Penaklukan Belanda atas Tanah Gayo, awalnya ditujukan untuk memadamkan “*De Atjeh Oorlog*” (Perang Aceh), yang sudah berlangsung tiga dekade. Setelah Tanah Gayo dikuasai dan Perang Aceh dianggap berhasil dipadamkan pada 1904, penaklukan dilanjutkan dengan usaha membuka perkebunan teh dan jagung.

Kemudian, pada 1908 Veenhuyzen mulai menanam kopi. Awalnya hanya sebagai tanaman nonkomersial dan dalam jumlah terbatas. Namun pada 1918 Pemerintah Kolonial membuka perkebunan kopi Wilhelmina di Blang Gele. Sebab kopi dari jenis Arabika yang dikembangkan di tanah tinggi Gayo ternyata laku keras di Eropa. Sejak saat itu, kopilah primadona komoditas perdagangan Belanda di Sumatera bagian tengah, bersama pala Pantai Barat Aceh dan tembakau Deli.

Seiring dengan berkembangnya perkebunan kopi di Tanah Gayo, Belanda mulai merekrut buruh dari tanah Jawa. Tak jarang, Belanda memberangkatkan satu keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak mereka, untuk bekerja di perkebunan-perkebunan kopi, baik di Aceh maupun Sumatera Utara. Mereka didatangkan secara bergelombang dan terikat dengan sistem kontrak yang mengacu pada *staatsblad* (lembaran negara) 1911 dan 1915. Belanda memanggil para pekerja Jawa ini dengan sebutan koeli kontrak.

Sebab itu, suku Jawa pekerja perkebunan di Sumatera dikenal dengan sebutan *Jawa Kontrak* atau *Jawa Kolonial*.¹

Setelah bekerja di perkebunan selama belasan bahkan puluhan tahun, moda transportasi dan komunikasi antardaerah yang sangat terbatas pada masa itu menyebabkan banyak dari para buruh ini kehilangan kontak dengan sanak saudara mereka di Jawa. Namun keramahan rakyat Gayo yang menerima kehadiran mereka dengan baik, mengubah apa yang tadinya nyaris berupa ‘hukuman’, menjadi suatu anugerah.

Keturunan dari para buruh perkebunan kopi ini, yang lahir dan dibesarkan di dataran tinggi Gayo, kemudian memilih untuk tetap tinggal di situ dan menganggap negeri indah itu sebagai tanah air mereka. Meskipun mereka banyak yang masih tetap mempertahankan budaya dan adat Jawa, misalnya melalui nama-nama berbau Jawa seperti Sutrisno atau Wiryo. Sebagian dari mereka masih cakap berbahasa Jawa, seperti misalnya di desa Jagong Jeget. Namun secara batin, jiwa mereka adalah penduduk Gayo. Orang Gayo.

Tradisi migrasi masa kolonial ini dilanjutkan dengan kebijakan transmigrasi oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dimulai pada tahun 1950, dengan keberangkatan 155 KK dari Karesidenan Kedu, Jawa Tengah, ke lokasi baru di Gedongtataan, Lampung. Program transmigrasi ini beberapa kali mendatangkan transmigran suku Jawa ke Gayo. Pada 29 April 2013, transmigran suku Jawa era Orde Baru di Jagong Jeget merayakan 31 tahun kedatangan mereka di Aceh Tengah. Dilansir *tempo.co*, mereka datang dalam tiga gelombang pada tahun 1982.²

Selama puluhan tahun keturunan suku Jawa hidup berdampingan dengan damai bersama penduduk asli Tanah Gayo. Juga bersama suku Aceh, Pakpak, Karo dan berbagai suku Batak lainnya. Kesuburan Tanah Gayo,

¹ Iswanto, Sufandi, dkk, *Gayo Highland Takengon from 1904 to 1942: a historical analysis of coffee plantations at the era of Dutch colonialism*, Paramita Historical Studies Journal, Faculty of Social Science Universitas Negeri Semarang, Semarang: 2020

² <https://nasional.tempo.co/read/476530/31-tahun-transmigran-jawa-di-gayo>, diakses pada 25 Agustus 2022 pukul 08.51 AM

ditambah udaranya yang sejuk dan bersih, dengan murah hati menghibahkan kemakmuran dan ketenteraman hidup, bagi siapa saja yang tinggal dan jatuh cinta padanya.

Semua etnis dapat mempertahankan budaya tanah asal, tanpa mencuat menjadi persoalan. Mereka saling menghormati, saling menyayangi, pembauran terjadi secara alamiah tanpa harus dipaksakan. Banyak etnis Jawa menikahi perempuan Gayo, dan sebaliknya. Bergelimang nikmat Allah berupa rezeki ekonomi yang disediakan tanaman kopi, tanah Gayo serupa sepotong surga yang jatuh ke bumi.

Tetapi, tak ada yang abadi di dunia ini. Ketenteraman tanah Gayo yang telah berabad usianya itu, terusik pada awal abad ke-21.

Konflik antara Pemerintah RI di Jakarta dengan Gerakan Aceh Merdeka yang telah berlangsung puluhan tahun, nyalanya menyambar dan membara di Tanah Gayo. Pada tahun 1999, intensitas konflik di Aceh meningkat justru setelah dicabutnya DOM (Daerah Operasi Militer) oleh Panglima TNI Jenderal Wiranto. Demikian juga dataran tinggi Gayo, yang segera akan menyaksikan lembaran hitam lain dalam catatan sejarahnya.

Di bulan Juni, Pemilu direncanakan akan diadakan di Aceh pada tanggal 9 Juni 1999. Sepekan sebelumnya, eskalasi ketegangan di Kabupaten Aceh Tengah meningkat. Dimulai dengan dibakarnya Kantor Camat Bintang oleh OTK (Orang Tak Dikenal) pada dini hari 3 Juni 1999. Padahal, kotak-kotak suara untuk keperluan Pemilu disimpan di sana. Secara bersamaan, OTK membakar pula Poliklinik Desa Tebes Lues, yang dijadikan tempat penitipan sementara beberapa kotak suara lainnya. Sementara di Singah Mulo, Kecamatan Timang Gajah, kotak-kotak suara yang tadinya disimpan di rumah-rumah penduduk terpaksa dikeluarkan karena penduduk khawatir rumahnya akan diserang OTK. Kotak-kotak yang kemudian dikumpulkan di dekat meunasah Singah Mulo itu, malamnya musnah dibakar OTK.

Kapolres Aceh Tengah saat itu, Letkol. Pol. Drs. Misik Natari mengatakan bahwa sasaran utama teror pembakaran adalah menggagalkan Pemilu,

dengan metode menghanguskan kotak suara.³

Selain pembakaran gedung-gedung fasilitas umum, penembak misterius (petrus) juga terus beraksi. Pada 4 Juni 1999, seorang warga desa Puting Beliung, Kecamatan Silih Nara, ditemukan telah menjadi mayat dengan luka bekas tembakan.⁴ Namun, ini bukan yang pertama. Berkali-kali warga Aceh Tengah menemukan jenazah korban petrus. Seperti juga di bagian-bagian Aceh lainnya, penembakan oleh petrus dan pembakaran gedung-gedung fasilitas umum kian menjadi bagian dari berita sehari-hari. Seperti dapat kita cermati dari catatan media massa, momentum menjelang Pemilu membuat ketegangan di Aceh Tengah bertambah.

Enambelas Juni 1999, Kapolri Jenderal Pol. Rusman Hadi mengatakan bahwa Pemerintah akan menambah jumlah pasukan Polisi di Aceh. Hal ini dikomentari oleh Koordinator KontraS, almarhum Munir: “Mobilisasi pasukan secara besar-besaran ke Aceh mencerminkan tidak adanya kemauan untuk merundingkan problem Aceh secara damai dan lebih sistematis.”⁵

Harapan bahwa kekerasan akan berkurang setelah Daerah Operasi Militer dicabut, sia-sia. Dalam beritanya tanggal 27 November 2000, *liputan6.com* menyebutkan bahwa menurut Komandan Resort Militer 012/Teuku Umar Kolonel Czi Syarifuddin Tippe, selama Jeda Kemanusiaan tingkat gangguan keamanan menunjukkan trend kenaikan di seluruh Aceh. Tippe menunjukkan data bahwa ada beberapa kejadian khusus yang meningkat drastis, terutama lumpuhnya perangkat pemerintahan sipil. Ini, menurut Tippe, karena stempel desa telah dikuasai pasukan GAM. Jenis kekerasan yang meningkat tajam antara lain tindak intimidasi terhadap warga.⁶

Seolah mengamini keterangan Tippe, pertengahan November 1999 Taken-gon nyaris jadi lautan api. Sejumlah gedung dibakar dan rakyat sipil berke-likaran seraya membawa AK 47. Syarifuddin Tippe mengatakan, GAM

³ HU Waspada, Medan, *Kantor Camat dan Kotak Suara Dibakar*, terbit 4 Juni 1999

⁴ Ibid

⁵ HU Serambi Indonesia, Banda Aceh, *Mobilisasi Pasukan cermin tak mau secara damai*, terbit 17 Juni 1999

⁶ <https://www.liputan6.com/news/read/4337/kesia-siaan-dua-jeda-kemanusiaan>, diakses pada 25 Agustus 2022 pukul 10.52 AM

menguasai 40% Aceh Tenggara, Aceh Tengah dan Banda Aceh.⁷

Seiring waktu, masyarakat Aceh Tengah keturunan Jawa mengaku, bahwa mereka mulai menerima teror intimidasi. Bentuk intimidasi beragam, mulai dari kalimat-kalimat serta ujaran kebencian, sampai ancaman pengusiran dan pembunuhan. Intimidasi dan teror juga terjadi dalam bentuk pembakaran rumah, perampokan atau permintaan paksa harta benda. Seorang perempuan muda yang berayahkan etnis Jawa mengaku pada KontraS, bahwa ayahnya yang tauke (pengepul) kopi diharuskan membayar hingga satu juta rupiah sepekan.⁸

Selama pekan awal bulan April 2001 tercatat 83 rumah warga sipil dibakar. Mayoritas rumah yang dibakar adalah milik etnis Jawa. Terjadi dua kali kontak senjata antara GAM dan aparat. Dua warga disebutkan tewas, dan gelombang pengungsian kembali terjadi.⁹ Data KontraS Aceh pada Januari 2001 menyebutkan, ada 6 warga hilang dan 2 menjadi korban penangkapan sewenang-wenang.¹⁰ Sedangkan Majalah TEMPO mencatat, bahwa dalam jangka waktu satu bulan mulai awal Juni hingga saat berita diturunkan, 8 Juli 2001, konflik bersenjata di kawasan Aceh Tengah telah menewaskan 148 orang, menghancurkan sekitar seribu rumah penduduk, dan memaksa 12 ribu warga mengungsi.¹¹

Awal bulan Juni 2001, Kecamatan Bandar diberitakan telah dikuasai GAM. Tercatat berlangsung sejak tanggal 5 hingga 17 Juni, selama Insiden Bandar berlangsung, disebutkan bahwa 57 warga meninggal, 23 luka-luka, 638 rumah penduduk dan sekolah dibakar. Sekitar 1200 warga dari Bandar dan Timang Gajah, kecamatan yang berdekatan dengan Bandar, mengungsi ke masjid-masjid, sekolah yang masih selamat dari pembakaran, dan ke Gedung DPRD Aceh.

⁷ Pane, Netta S, *Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka: solusi, harapan dan impian*, Penerbit Grasindo, Jakarta: 2001

⁸ Guci, Dian, *Mereka Masih Dilupakan*, KontraS Aceh, Banda Aceh: 2012

⁹ HU Waspada, Medan, *Sudah 83 rumah di Aceh Tengah dibakar*, edisi 4 April 2001

¹⁰ HU Serambi Indonesia, Banda Aceh, *Data KontraS: selama Desember 2000 ada 184 Korban Kekerasan*, terbit 5 Januari 2001

¹¹ <https://majalah.tempo.co/read/nasional/81320/mayat-mayat-di-tanah-gayo?usefree=true> diakses pada 5 September 2002 pukul 08.04 AM

Empat ratus personil aparat diturunkan ke sana, dan pada 17 Juni 2001 aparat berhasil menguasai kembali Kecamatan Bandar.¹²

Menurut seorang koresponden HU *Waspada* untuk Aceh Tengah, Bahtiar Gayo, konflik di Aceh Tengah berbeda dengan di Aceh pesisir. Menurut Bahtiar, di Aceh Tengah masyarakat berswadaya merakit senjata api dan petasan sendiri, sebagai sebuah bentuk pertahanan dari serangan GAM. Sehingga, kata Bahtiar, “Kadangkala sulit membedakan mana masyarakat yang mempunyai senjata rakitan, dan mana yang GAM.” Aksi masyarakat ini dipicu Insiden Bandar yang memorakporandakan Aceh Tengah.¹³ Pernyataan Bahtiar Gayo dikuatkan kesaksian warga sipil, seperti yang akan dibuktikan nanti dalam bagian selanjutnya di buku ini.

Komposisi pancarona masyarakat di Tanah Gayo menjadi lahan bagi pihak tertentu untuk menumbuhkan isu SARA. Seiring dengan maraknya kasus pengusiran warga etnis Jawa di daerah lain, desas desus bahwa warga keturunan Jawa harus hengkang dari tanah Gayo santer bergema. Beredar kabar bahwa etnis Jawa yang nekat melewati “daerah orang Aceh” akan terkena sweeping, dan hilang tanpa bekas.

“Mulai tahun 2000, dataran tinggi Gayo, khususnya Aceh Tengah, muncul sentimen etnis dalam bentuk pembakaran rumah penduduk,” kata Jubir Partai Aceh, Muhammad Shaleh, dalam sebuah wawancara dengan liputan6.com, Oktober 2019.¹⁴ Shaleh sendiri diwawancarai wartawan terkait surat panggilan yang dikirim Komnas HAM RI kepada mantan Panglima GAM Muzakkir Manaf, untuk mengklarifikasi peristiwa Timang Gajah, dimana beberapa warga sipil dinyatakan hilang.

Pada masa tegang itu, istilah “Aceh Pesisir” dan “Pagar Kampung” mulai merebak. “Aceh Pesisir” merujuk pada warga tanah Gayo dari etnis Aceh.

¹² HU Waspada, *Aparat Berhasil Rebut Kembali Wilayah Bandar*, edisi 19 Juni 2001

¹³ Gayo, Bahtiar, *Upaya Menggugah Pihak yang Bertikai*, modul “Resolusi Konflik Melalui Jurnalisme Damai”, Yayasan TiFA dan KIPPAS, Banda Aceh: 2005

¹⁴ <https://www.liputan6.com/regional/read/4085404/menerka-sipa-orang-jahat-dalam-tragedi-timang-gajah-di-aceh>, diakses pada 25 Agustus 2022 pukul 15.42 PM

Sementara “Pagar Kampung” mengacu pada kelompok dalam masyarakat yang terbentuk sebagai reaksi rakyat terhadap teror dan kekerasan. Umumnya kelompok ini digagas oleh warga etnis Jawa, yang karena tekanan teror kemudian meminta perlindungan pada TNI/Polri. Mereka inilah yang kemudian menjadi milisi.

Pondok Kresiek adalah satu dari sekian desa yang dilanda keresahan berbasis etnis ini. Desa yang kini bernama Sedie Jadi dan termasuk ke dalam Kabupaten Bener Meriah (pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah), memiliki cukup banyak penduduk etnis Jawa.

Reje (Kepala Desa) Pondok Kresiek, Sutrisno, mengisahkan ketegangan di desanya yang semakin meningkat pada Juni 2001. Menurutnya, sebelum Peristiwa 5 Juni, desas desus tentang pengusiran warga etnis Jawa di Jantho, Samalanga dan beberapa daerah lain semakin santer terdengar. Juga berita tentang *sweeping* GAM terhadap etnis Jawa yang masuk atau melewati daerah suku Aceh. Mereka yang terkena *sweeping* ini akan hilang untuk selamanya.

Mulanya Sutrisno tidak mempercayai hal ini. Kesangsiannya berubah menjadi keyakinan ketika pamannya yang tinggal di Kabupaten Aceh Utara (sekarang termasuk Bireuen) menjadi korban pengusiran. Bahkan, jenazah sang paman belakangan ditemukan warga, mengeletak di tengah semak.¹⁵

Dalam kondisi serba terdesak, dengan masa depan yang semakin tak pasti, para korban pengusiran ini memilih untuk segera angkat kaki. Daripada nyawa menjadi taruhannya. Umumnya, mereka terpaksa menjual harta mereka dengan harga yang ditentukan pembeli secara sepihak.¹⁶

Gelombang pengungsian melanda Tanah Gayo. Mereka yang sanggup mengungsi umumnya melakukannya secara bertahap. Berlainan dengan korban pengusiran, yang biasanya memutuskan untuk berusaha keluar dari

¹⁵ Marzuki, Nashrun, Ed., *Kebenaran Untuk Anak Cucu*, Koalisi NGO HAM Aceh, Banda Aceh: 2011

¹⁶ Marzuki, Nashrun, dan Warsidi, Adi, Ed. *Fakta Bicara.*, Koalisi NGO HAM Aceh., Banda Aceh: 2011

Aceh, mereka yang mengungsi masih berharap suatu saat akan dapat kembali ke Tanah Gayo. Biasanya, karena para pengungsi *pujakesuma* (putra Jawa kelahiran Sumatera) ini tidak tahu harus “pulang” ke mana. Sebab, negeri tumpah darah mereka, tanah kelahiran mereka, adalah Aceh. Mereka sudah tak tahu lagi kampung asal nenek moyangnya di pulau Jawa.

Karena itu mereka mencoba untuk sedapat mungkin mempertahankan aset tak bergerak berupa kebun, ladang maupun rumah. Berbareng, mereka juga harus segera mencari keselamatan. Untuk kebutuhan hidup selama di pengungsian, umumnya penduduk yang mengungsi menjual kendaraan atau sebagian dari kebun mereka. Tentu, jumlah yang didapat dari usaha penjualan tergesa seperti ini, hanya cukup untuk beberapa saat. Mereka yang beruntung memperoleh pekerjaan di pengungsian, menjadi kuli bangunan misalnya, dapat sedikit bernafas lega. Setidaknya ada rezeki untuk menyambung nyawa.¹⁷ Tetapi bagi yang tak beruntung, barak pengungsian adalah “gubuk derita” tempat segala ketidaknyamanan dan kedukaan berkumpul.

Sementara sebagian besar warga mengungsi, banyak juga yang memutuskan untuk bertahan. Selain karena “tidak tahu harus ke mana”, cukup banyak warga yang ingin mempertahankan “periuk nasi” mereka. Yaitu kebun-kebun kopi dan ladang lainnya.

Mereka inilah yang kemudian terlibat, dan menjadi korban, pada Peristiwa Pondok Kresek 5 Juni 2001, dan Peristiwa Pepedang, 9 Juni 2001. Pertumpahan darah dan kekejaman demi kekejaman yang terjadi, adalah diluar apa yang bisa ditahankan nurani manusia.

Bertahun bahkan berpuluh tahun, apa yang terjadi di Pondok Kresek, hanya menjadi kisah seram yang dicitrakan dalam bisikan. Apa pun yang dirasakan oleh mereka yang selamat, atau oleh pelaku, seperti terkubur dalam selimut waktu. Hanya monumen Perlawanan Rakyat di tengah desa Pondok Kresek, yang kini menjadi Sedie Jadi, setia mengingatkan bahwa peristiwa itu pernah terjadi.

¹⁷ Wawancara dengan Yusdarita di Rembele, 23 November 2021



Peristiwa Itu
Malam Purnama Berdarah

5 Juni 2001

Malam Purnama Berdarah 5 Juni 2001

Sutrisno, seorang pujakesuma kelahiran Gayo, baru saja dilantik menjadi Reje Pondok Kresek, pada penghujung tahun 2000. Pondok Kresek adalah sebuah gampong yang merupakan bagian dari Kecamatan Bukit, 14 km dari Kota Takengon.

Dalam masa jabatannya yang baru seumur jagung, kabar tak sedap sampai ke telinga Sutrisno, mendera batin warganya. Bisik-bisik garau tentang pengusiran warga Gayo yang berasal dari etnis Jawa, berhembus kencang dan menggiriskan. Mereka yang merasa memiliki leluhur berasal dari Jawadwipa, dilanda rasa cemas dan ngeri luar biasa.

Pada awalnya, Sutrisno ragu. Ia yang lahir di Aceh Tengah pada 27 Mei 1967, mengenal tanah Gayo sebagai satu-satunya tumpah darahnya. Keluarga besarnya sudah menetap di dataran tinggi jantung Sumatera itu sejak tahun 1937, sudah hampir delapan dekade lamanya. Sutrisno sadar benar, ia berakar pada darah dan budaya Jawa. Tetapi bila saat itu ia ditanya, di mana kampung nenek moyangnya di Jawadwipa, ia akan mengangkat bahu. Tidak tahu. Benar, setelah menjadi anggota DPRK Aceh Tengah pada 2010, ia putusan melacak sanak kerabat asal usulnya di Jawa, dan berhasil menemukan jejak mereka. Namun pada bulan Juni 2001 itu, Sutrisno sama tidak tahunya dengan sebagian besar tetangga sesama transmigran, di mana kampung asal leluhur mereka.

Kabar burung bahwa etnis Jawa akan diusir dari tanah Gayo, dan bahwa bila tidak segera angkat kaki mereka semua akan dibunuh, awalnya menimbulkan keraguan dalam hati Sutrisno. Ia tak percaya, silaturrahim dan pergaulan sosial penuh keakraban di antara etnis Jawa, Gayo, Aceh dan etnis lainnya di tanah Gayo, yang telah ratusan tahun usianya itu, dapat diguncangkan.

Keyakinan itu hancur berkeping saat pamannya, J, menjadi korban pengusiran sekelompok OTK. Pada 6 September 2000, jasad sang paman kemudian ditemukan warga, telantar di tengah semak samun Wih Kanis. Sepekan

setelah tiada, jenazah Paman J dibawa dan dimakamkan di Pondok Kresek. Meninggalnya Paman J menyambar batin Sutrisno dengan kenyataan pahit: ternyata isu tentang kebencian dan pengusiran etnis Jawa itu, benar adanya.

Dengan demikian, anjuran untuk “melarikan diri” adalah sesuatu yang harus dipertimbangkan dengan serius. Apalagi, menurut Sutrisno kondisi keamanan setelah pamannya ditemukan tewas, sangat tegang. Anggota GAM menguasai Kecamatan Permata dan daerah sekitarnya, dan mereka secara terang-terangan berkeliaran seraya menenteng senjata api. Penguasaan Permata berlangsung selama 11 hari, dan selama itu pula kecemasan warga berada di titik kulminasi.

Kesadaran tentang kebenaran isu pengusiran bahkan pembunuhan atas etnis Jawa, serta kebenaran anjuran mengungsi, berbaur dengan rasa geram, marah, sekaligus tak berdaya, bergolak dalam dada Sutrisno. Sutrisno tak tahu, harus pergi ke mana. Leluhurnya memang orang Jawa, namun Sutrisno tak mengenal Pulau Jawa. Kampung leluhurnya yang ada di sana, bukan lagi merupakan kampungnya.

Kampung Sutrisno di sini, di Pondok Kresek. Di Tanah Gayo.

Karena itu, Sutrisno memutuskan untuk bertahan. Atas alasan yang sama, yaitu karena tak tahu harus lari ke mana, sebagian besar warga Pondok Kresek mengikuti teladan Reje-nya. Mereka memutuskan untuk bertahan di Pondok Kresek. Walau apa pun yang terjadi.

Meski sudah bulat hati takkan hengkang, sekian puluh KK di Pondok Kresek tetap dirundung rasa cemas dan khawatir akan keselamatan diri dan keluarga mereka. Rasa yang sama menghinggapi sanubari seluruh etnis Jawa pujakesuma yang tersebar di kampung-kampung lain di Aceh Tengah. Jumlah mereka secara keseluruhan adalah sekitar 30% dari seluruh penduduk Aceh Tengah.

Rasa takut membuat hubungan antar individu dan antar kampung masyarakat suku Jawa semakin solid. Warga kampung-kampung yang menolak mengungsi dan memutuskan akan bertahan, kian kerap berkum-

pul dan bermusyawarah di Pondok Kresek. Menimbang keadaan serta merundingkan langkah-langkah yang harus diambil. Pondok Kresek menjadi semacam titik pusat kegiatan etnis Jawa dalam mencari keselamatan. Banyak warga kampung lain, seperti Desa Ketol, Buntul, dan Jumirah, memilih mengungsi ke Pondok Kresek, karena merasa bahwa Pondok Kresek lebih aman dari desanya sendiri.

Salah satu warga pengungsi ini antara lain Karyanto. Ia dan keluarganya, terdiri dari ibu, istrinya Yusmar dan dua anaknya, mengungsi dari desa Lewa Jadi ke Pondok Kresek. Saat itu anak bungsu Karyanto, Erma Juni Prastika, belum genap dua tahun. Tapi, ujaran kebencian dan ancaman terhadap etnis Jawa di kampung asal mereka sudah terasa sangat menghimpit sehingga Karyanto memutuskan untuk henggang dari sana.

“Hei Jawa! Kenapa nggak cepat pulang! Tunggu mati ya!” Karyanto mengulangi ancaman yang didapatnya, seperti diceritakannya dalam wawancara dengan BBC Indonesia.¹⁸ Inilah salah satu bukti, bahwa pada masa itu memang ada sentimen suku dan etnis di Tanah Gayo.

Saat itu, masyarakat di Pondok Kresek tahu, mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Menurut Sutrisno, setelah pendudukan Kecamatan Permata, ia sempat menghadap pada Bupati Aceh Tengah, yang saat itu dijabat oleh Mustafa Tamy. Ia memohon agar Pemerintah menempatkan aparat keamanan di desanya. Namun, permintaannya itu tidak mendapat tanggapan positif.¹⁹

Dengan demikian Sutrisno tahu, apapun yang terjadi, ia dan warga kampungnya harus mengambil inisiatif tindakan sendiri. Mereka juga tahu, siapa pihak yang berseberangan dengan mereka, dan bagaimana peta kekuatannya. Yang jelas, pihak sana memiliki senjata api. Karena itu, Sutrisno memutuskan untuk mengerahkan potensi warganya untuk merancang strategi pertahanan.

¹⁸ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60939548> diakses pada 28 Agustus 2022 pukul 16.50 PM

¹⁹ Marzuki, Nashrun, dan Warsidi, Adi, Ed. Op.cit, hal 174

Salah satu penduduk Pondok Kresek, Tg,²⁰ memiliki pengalaman matang sebagai anggota pasukan tempur OPR (Operasi Perlawanan Rakyat), di masa Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Ia ahli merakit senjata api. Tg menyanggupi untuk membuat kecepek, semacam senapan lantakan tradisional.

Warga desa menyuplai bahan-bahan pembuat kecepek ini bagi Tg. Mesiu kecepek buatan Tg dibuat dari mata korek api yang ditumbuk. Hanya, tentu saja warga kesulitan menyediakan peluru. Ke dalam lubang untuk peluru, Tg memasukkan hancuran besi, dari besi apa saja yang dapat ditemukan, termasuk paku dan sekrup.

Sepintas nampak kasar dan sederhana, namun kecepek adalah senjata yang mematikan. Radius lontaran amunisinya mencapai 60 meter.²¹ Senapan ini mematikan dengan cara sangat menyakitkan. Karena peluru yang berupa hancuran besi tadi menyebar dalam kecepatan tinggi, dapat menembus tubuh lawan di berbagai titik. Kalau pun lawan tidak langsung tewas, namun ia akan lumpuh oleh luka-luka ganda yang disebabkan ratusan fragmen besi.

Tersedianya kecepek belum membuat warga merasa aman. Salah seorang penduduk Pondok Kresek, Pirin, mengusulkan agar warga membuat lubang perlindungan, semacam bunker yang dapat digunakan untuk bersembunyi dan bertahan, sekiranya pihak yang berseberangan dengan mereka datang menyerbu. Usulan ini diterima Sutrisno dengan kerut kening, sebab ia beranggapan bahwa pembuatan bunker terlalu berlebihan. Ia masih merasa bahwa situasi mungkin memang buruk, tapi takkan sampai terjadi peperangan di desanya.

Namun Pirin jalan terus, ia dibantu istrinya berhasil menggali sebuah lubang perlindungan yang cukup besar. Usahnya itu ditiru oleh beberapa warga lainnya. Sementara itu, warga merasa bahwa serpihan paku dan besi untuk amunisi kecepek, belumlah cukup. Dengan berbagai cara, mereka berusaha memperoleh peluru. Antara lain dengan menukarkan kayu ende-

²⁰ Marzuki, Nashrun, dan Warsidi, Adi, Ed, Op.Cit, hal 173

²¹ Marzuki, Nashrun, dan Warsidi, Adi, Ed. Loc.cit

mik tanah Gayo, kayu grupel²², dengan peluru tajam.

Kayu grupel adalah kayu beraroma atsiri yang harum, dan memiliki serat unik, cantik. Saking indah, kayu grupel kerap digunakan untuk membuat dashboard mobil mewah. Di alam, pohon yang kini telah terancam punah ini dapat mencapai ketinggian 35 meter, dengan diameter 100 cm. Serat unik dan keharumannya membuat grupel berharga mahal.

“Ketika itu ada pasukan Brimob datang patroli. Kami menukar kayu grupel dengan peluru,” kata Sutrisno. Setiap limapuluh-enampuluh panel kayu grupel ukuran sedang, ditukar dengan lima peluru. Dengan cara itu, penduduk Pondok Kresek membekali diri untuk menghadapi penyerang. Meski telah diusahakan dengan berbagai cara, namun tetap saja persediaan peluru tidak mencukupi. Karena itu Sutrisno memutuskan, “Yang penting mesiu saja dulu. Meski pun peluru tidak ada, minimal kita bisa menakut-nakuti dengan suara letusan.”

Sebenarnya, lama sebelum itu pada malam hari warga Pondok Kresek telah tidak tidur di rumah masing-masing. Perempuan dan anak-anak berkumpul di rumah yang dianggap aman, sementara para lelaki berjaga-jaga dalam beberapa kelompok. Hal ini dilakukan atas instruksi aparat keamanan, yang menganjurkan penduduk agar melakukan jaga malam massal, di seluruh Kabupaten Aceh Tengah.

Agar lebih memudahkan komunikasi selama berjaga, penduduk mengusahakan pengadaan handy talkie. Alat itu ternyata dapat menangkap frekuensi komunikasi yang dilakukan oleh pihak yang berlawanan dengan penduduk Pondok Kresek. Pihak seberang itu bicara menggunakan sandi. Setelah menguasai cara penggunaan HT, diam-diam Sutrisno dan warganya berusaha mempelajari bahasa sandi yang sering mereka dengar itu, agar dapat mengetahui rencana pergerakan pihak sana.

Ketegangan saat itu benar-benar seperti dalam suasana perang. Usaha warga memahami sandi yang digunakan pihak lawan menubruk tembok, namun

²² *Lisea*, sp

dengan analisa serta deduksi seadanya, percakapan yang dicuri-dengar warga melalui HT memberi petunjuk bahwa dibulan itu memang ada rencana serangan ke desa-desa yang dihuni etnis Jawa. Sampai tanggal 4 Juni, dugaan terkuat adalah bahwa akan ada serangan ke desa Pondok Gajah dan Sidodadi. Asumsi ini adalah karena Pondok Gajah dan Sidodadi keduanya merupakan kampung dengan mayoritas penduduk etnis Jawa.

Desa Pondok Gajah memiliki Koramil, dengan kekuatan 12 orang TNI yang berasal dari Batalyon 142. Jumlah 12 orang ini dibagi dua, enam orang ditempatkan di Sidodadi untuk mengantisipasi serangan. Tidak ada yang pernah berpikir, bahwa Pondok Kresek akan diserang. Karenanya, bahkan masyarakat Desa Jamur Atu yang puluhan kilometer jauhnya, mulai datang mengungsi ke Pondok Kresek.

Malam hari 5 Juni 2001, seperti biasa kaum ibu dan anak-anak membawa bantal dan selimut, berangsur masuk ke beberapa rumah penduduk yang dijadikan “rumah aman”. Sementara kaum bapak dan pemuda membawa senjata seadanya, apa pun yang ada, menempatkan diri di dua buah pos penjagaan yang ada.

Disebut pos sebenarnya agak kurang tepat, karena yang dipanggil demikian bukan merupakan sebuah bangunan tunggal seperti umumnya pos siskamling. Pos jaga di Pondok Kresek waktu itu hanya sebuah titik yang telah ditentukan lebih dulu di tempat yang dianggap strategis, sementara penduduk yang mendapat giliran berjaga biasanya duduk di teras rumah-rumah di sekitar situ.²³

Pondok Kresek terletak di ketinggian, di lereng sebuah bukit. Rumah penduduk menyebar di sepanjang lereng ini, sehingga akses jalan berada di lahan miring. Pos jaga dibuat di kedua ujung desa, sebuah di bagian atas, dekat puncak lereng, satunya di bawah, di jalan masuk utama desa yang letaknya lebih rendah daripada pos pertama. Di seputar desa terdapat ladang-ladang jagung, palawija dan kebun-kebun kopi, sementara lahan di antara rumah penduduk juga subur ditumbuhi berbagai jenis pohon dan

²³ Wawancara dengan Karyanto, akhir tahun 2021

tanaman. Pada malam hari, udara dingin turun dari gunung Bur ni Telong, kadang disertai kabut tebal, terutama di musim kemarau.

Malam hari 5 Juni 2001, kaum lelaki yang berjaga malam membuat api unggun di depan masing-masing pos. Termasuk Sutrisno dan kawan-kawan. Malam itu ada tujuh lelaki dalam kelompok Sutrisno. Mereka berjaga di pos bawah, di mulut jalan masuk ke desa. Sutrisno membawa kurang lebih 10 butir peluru tajam. Delapan lelaki lain berjaga di pos atas.

Beberapa warga mengumpulkan dan membakar jagung, untuk membantu menghangatkan tubuh. Saat itu sekitar pukul 22.00 WIB. Suasana sunyi dan tenang. Udara dingin membuat kandung kemih cepat penuh. Salah satu anggota kelompok di pos atas yang sedang berjaga, keluar dari lingkaran unggun untuk buang air kecil.²⁴

Dalam kesunyian, di tengah kegelapan semak-semak, ia merasa kurang enak. Seakan ada firasat buruk. Ia berdiri seraya mengedarkan pandang berkeliling. Saat menatap ke arah ketinggian bukit, ia terkesiap. Terlihat bayangan belasan orang mengendap-endap di balik semak dan pepohonan, mendekati ke arah mereka yang tengah berjaga.

Spontan dia kembali ke kelompoknya, berbisik genting, “Ada orang!”
“Siapa??”

Belum sempat menjawab, terlihat olehnya bayangan pasukan di semak-semak semakin mendekat. Ketegangan mendorongnya untuk menarik pelatuk kecepek. Dor!

Di pos bawah, Sutrisno mendengar ledakan itu. Awalnya ia mengira, para pemuda di pos atas iseng bermain dengan petasan, yang dibuat juga oleh warga untuk melengkapi persenjataan.

“Kurang ajar itu anak-anak. Belum ada perintah, sudah main petasan,” pikir

²⁴ Marzuki, Nashrun, dan Warsidi, Adi, Ed. Op.cit, hal 176

Sutrisno jengkel. Ia baru saja berpikir hendak mengontrol ke pos atas, saat mendadak kembali terdengar rangkaian letusan. Kali ini telinga Sutrisno mengenali salakan senapan serbu AK 47. Ia tersadar, kampungnya tengah diserbu.

Sang kepala kampung langsung meneriakkan komando agar warganya segera berlari ke pos atas, membantu mereka yang tengah bertempur. Namun belum sempat beranjak jauh, langkah mereka terhenti. Sosok-sosok asing bermunculan dari semak, hanya sekitar 30 meter dari pos jaga.

Urung menuju pos atas, Sutrisno dan kawan-kawan memilih berlindung di rumah salah satu warga. Terbatasnya peluru menyebabkan mereka baru menembak jika sasaran sudah terlihat jelas. Sementara itu, di pos atas, kelompok warga memilih mundur dan berlindung. YA, salah satu pemuda yang malam itu berjaga di atas, mengatakan bahwa mereka sudah dikepung. Meski listrik padam, namun malam terang benderang oleh limpahan cahaya bulan purnama. Sambil berlindung, YA dan kelompoknya sesekali melepaskan tembakan, yang kontan disambut serentetan salakan senapan dari arah berbeda.

Dari tempat mereka berlindung, YA dan kelompoknya melihat bahwa orang-orang yang datang tadi mulai membakar rumah penduduk. Rumah YA adalah salah satunya. Di pos bawah, Sutrisno dan kawan-kawan berusaha mendekat ke pos atas, seraya bergerilya sekali-sekali melepaskan tembakan balasan. Dalam perjalanan menuju pos atas, mereka menemukan rekan sesama warga Pondok Kresek, Edy Suyono. Lelaki itu tergeletak bersimbah darah, jelas terkena tembakan. Lukanya demikian berat, sehingga ia menghembuskan nafas terakhir sesaat setelah dievakuasi ke dalam salah satu bunker.

Selama jam berikutnya, Sutrisno dan kawan-kawan terus bergerilya. Mereka tidak meninggalkan Pondok Kresek, hanya bersembunyi. Layaknya kucing dan tikus, kelompok Sutrisno bergerak menghindari para penyerbu, mengandalkan pengetahuan mereka akan medan tempur yang sangat mereka kenal. Sambil bersembunyi dan mengamati, Sutrisno dapat melihat dan mendengar para penyerbu membakar rumah penduduk, diiringi

teriakan-teriakan dalam bahasa Aceh dan bahasa Gayo. Yang diteriakkan adalah ujaran kebencian terhadap etnis Jawa.

Rumah Sutrisno turut dibakar. Belakangan, Sutrisno mengatakan bahwa di antara para penyerbu berpakaian loreng itu ada beberapa orang yang membawa jerigen berisi minyak tanah. Mereka ini bertugas membakar rumah, sementara yang lain melumpuhkan penduduk. Menurut Sutrisno, mereka yang datang berjumlah ratusan. Dan setiap satu regu (7-12 orang) penyerbu memiliki satu senjata api.

Sekitar pukul 21.30, malam purnama 5 Juni itu, Karyanto baru saja hendak masuk rumahnya. Karyanto dan keluarganya baru dua hari menempati rumah itu. Sebelumnya ia tinggal di desa Lewa Jadi.

Sebagai warga desa yang baik, tentu saja Karyanto turut berjaga, malam itu. Ia mendapat tempat di pos bawah. Seiring bergulirnya jam demi jam, kehadiran bulan purnama menyengatkan dingin yang lebih istimewa dari biasa. Karyanto memutuskan untuk mengambil jaket di rumahnya, yang digantungkan di dapur.

Saat ia baru saja melangkah ke dalam rumah, mendadak didengarnya kerosak rerumputan dan dedaunan di sekitar rumah. Itu dersik gerakan dari banyak orang.

“Ada sekitar seratus orang,” katanya. Karyanto dapat melihat mereka di bawah siraman cahaya purnama. Ia bahkan dapat mengenali, orang-orang itu mengenakan baju loreng dan/atau hitam, dengan wajah bersebo (topi wol yang dapat ditarik ke bawah menjadi topeng menutupi wajah). Mereka bersenjata.

Tanpa ba-bi-bu, Karyanto langsung meninggalkan rumah, lewat pintu belakang. Sementara itu letupan senjata api mendadak menggema, beberapa kali.

Saat tembakan pertama meletus, Yusmar istri Karyanto, membawa kedua anaknya Feri Satria Pambudi (4 th) dan Erma Juni Prastika (23 bulan), lari

Keluar Semua! KELUAR! RUMAH INI MAU DIBAKAR !!

melintasi ruang tengah rumah, hendak bersembunyi di kamar tidur mertuanya. Berondongan tembakan menyusul menghujani rumah. Berempat mereka bertiarap, berharap desingan peluru tak bisa mencapai mereka. Timah panas menyambar kaki ibu Karyanto, dan satu lagi mengenai kepala Erma. Bocah kecil itu menangis. Tapi saat itu Yusmar tak menyadari bahwa putrinya telah terluka. Gemerincing kaca jendela yang dipecahkan popor senapan, membelah suasana. Ada beberapa orang menerobos masuk lewat jendela yang pecah itu. Diiringi bentakan-bentakan garau, mereka menyerbu.

“Keluar semua! Keluar! Rumah ini mau dibakar!”

Yusmar sempat ditarik oleh salah seorang penyerbu, dibentak agar bangkit. Seluruh penyerbu itu membentak-bentak mengusir Yusmar sekeluarga. Dihimpit rasa takut luar biasa, Yusmar bersama kedua anaknya, Erma dalam gendongan, keluar rumah. Ia juga berusaha memapah mertuanya, yang kakinya telah terluka parah. Tujuannya: kebun kopi di belakang rumah, yang letaknya agak tinggi.

“Kalian saja yang pergi, Mamak biar tinggal di sini saja,” ujar mertua Yusmar, Amah, yang duduk numprah karena tak sanggup lagi berjalan. Namun Yusmar terus mencoba memapahnya, hingga akhirnya mereka berhasil menyusup masuk di antara barisan pohon kopi. Di sana mereka bertemu Karyanto, yang telah lebih dulu bersembunyi. Saat itu Yusmar merasakan suatu cairan membasahi kepala Erma. Ia sadar, putrinya terluka.

“Semula saya kira terkena pecahan kaca,” kata Yusmar. Dia menduga demikian karena saat lari ada ribuan keping kaca jendela yang hancur beterbangan. “Tapi waktu saya nyalakan korek untuk memeriksa, ternyata kepala Erma, dekat pelipis, berlubang. Darah bercampur otak meleleh keluar,” sambung Karyanto.

Mereka sekeluarga berhimpitan bersembunyi, berharap cahaya bulan tidak mengkhianati keberadaan mereka. Sementara itu, di depan mata mereka, rumah yang baru dua hari mereka tempati, mulai menyala—para penyerbu membakarnya.

Keadaan baru tenang pada sekitar menjelang tengah malam, pukul 23.30. Satu setengah jam setelah letusan pertama, warga menyisir kampung, memeriksa kerusakan dan mencari korban. Sungguh ironis bahwa sang pembuat bunker, Pirin, adalah salah satu korban yang paling dulu ditemukan. Tubuhnya dalam kondisi setengah hangus, dan kepalanya terbelah oleh tetakan kelewang. Menurut kesaksian warga, malam itu Pirin mendapat kabar bahwa rumahnya, yang terletak di sisi lain desa, sudah dibakar orang. Walau ditahan rekan-rekannya, Pirin berkeras untuk pergi, hendak menyelamatkan keluarganya. Diduga, saat menelusuri kebun menuju rumahnya itulah almarhum terpergok oleh pasukan penyerbu. Pirin adalah ayah kandung Karyanto.

Korban lain, Marnak, ditemukan telah menjadi abu di dalam salah satu bangunan yang dibakar. Seorang lagi adalah Zen Kaharuddin. Yang terakhir adalah batita yang seharusnya berulang tahun kedua bulan Juni itu, Erma Juni Prastika. Erma meninggal dalam kendaraan, saat hendak dibawa ke fasilitas kesehatan di Takengon.

Aparat dari Koramil di Pondok Gajah baru tiba pada selewat tengah malam, sekitar pukul 00.30. Saat itu pasukan penyerbu telah mundur, meninggalkan jejak darah, serta selongsong peluru dari berbagai jenis senjata, termasuk sisa yang diluncurkan menggunakan GLM (Grenade Launcher Machine). Sutrisno bersaksi, Peristiwa 5 Juni tidak lantas meletus menjadi perang saudara yang lebih mengerikan lagi, adalah karena usaha seseorang. Seorang anggota TNI dari Batalyon 142, yang tak letih mencoba memediasi antara pihak etnis Jawa dengan etnis Gayo dan Aceh.²⁵

Kini, lima sosok relief yang mewakili kelima korban, berdiri di dinding Tugu Perlawanan Rakyat, yang berada di tengah desa Sedie Jadi. Desa yang dulu bernama Pondok Kresiek. Pada tugu yang diresmikan Komandan Kodim 0106 Aceh Tengah, Dodi Herardi, tahun 2002 itu, Erma Juni Prastika digambarkan sebagai gadis kecil yang membawa karangan bunga. Bunga adalah ciptaan Tuhan yang senantiasa identik dengan keindahan dan kedamaian, layak kiranya bila bocah tak berdosa seperti Erma yang digambarkan membawanya.



Pasca Peristiwa Pondok Kresiek, hanya empat hari kemudian, 9 Juni 2001, terjadi Peristiwa Pepedang, yang mengakibatkan lebih banyak lagi korban jatuh. Menurut kesaksian M Shahéh²⁶, seorang anggota Satgana PMI Aceh dan mantan Kepala Kamar Mayat di RS Datu Beru Takengon, ada lebih

²⁵ Ibid, hal 180

²⁶ Marzuki, Nashrun, Ed., *Kebenaran Untuk Anak Cucu*, Koalisi NGO HAM, Banda Aceh: 2011, Hal. 117-122

dari 27 korban di jurang Pepedang. Semua jenazah korban dalam kondisi tidak utuh, sebagian bahkan telah dimakan biawak.

Isu SARA dan ujaran kebencian berbasis etnis, menyebabkan mereka yang merasa sebagai perantau di tanah Gayo, meminta perlindungan pada aparat keamanan. Sutrisno mengatakan, ia sendiri bergabung ke dalam organisasi PETA (Pembela Tanah Air) bentukan TNI-Polri. Menurutnya, gerakan-gerakan perlawanan itu didirikan secara terpisah oleh kelompok rakyat untuk melindungi diri dari GAM, contohnya ada Gabungan Putra Daerah (GARUDA), Puja Kesuma Tanah Gayo, dan beberapa lainnya²⁷. Sutrisno juga mengatakan, bahwa di Bener Meriah organisasi anti-GAM dikenal dengan nama Persatuan Perlawanan Rakyat Merah Putih (PPRM).

Dalam jumpa pers di Jakarta pada 12 Juli 2005, Aceh Working Group yang terdiri atas organisasi Imparsial, KontraS dan Human Rights Working Group menyatakan bahwa jumlah warga sipil yang dipersenjatai alias milisi di Aceh pasca Darurat Sipil diduga meningkat. Pihak TNI membantah telah melatih milisi sipil guna menghadapi GAM. Mereka mengatakan bahwa TNI hanya melatih PAM Swakarsa untuk pengamanan lingkungan.²⁸

Koordinator Aceh Working Group (AWG) Rusdi Marpaung mengatakan, proses pembentukan milisi tidak terlepas dari keterlibatan negara, tapi justru tidak mendapatkan pengakuan dari Negara, walau pada faktanya anggota milisi direkrut dari sejumlah desa, diperkenankan membawa senjata bahkan dilatih oleh militer. Rusdi menyebutkan Gerakan Pemuda Merah Putih (GPMP) sebagai contohnya. GPMP yang anggotanya berjumlah 10.000 orang ini didirikan pada 19 Agustus 2003 dengan ketuanya Abdullah Puteh dan Helfizar Ibrahim.²⁹

²⁷ <https://kumparan.com/acehkini/perlawanan-di-kampung-kresek-aceh-cikal-bakal-front-anti-gam-1rjilSuxLyp/3>, diakses pada 30 Agustus 2022 pukul 15.30 PM

²⁸ <https://news.detik.com/berita/d-401454/pemerintah-diminta-monitor-milisi-di-aceh>, diakses pada 30 Agustus 2022 pukul 15.39 PM

²⁹ <https://news.detik.com/berita/d-615358/pemerintah-harus-akui-milisi-di-aceh>, diakses pada 30 Agustus 2022 pukul 15.49 PM

Sedangkan menurut Rafendi Djamin, Koordinator Human Rights Working Group (HRWG), Pemerintah melakukan remobilisasi dan mencampuradukkannya ke dalam Badan Reintegrasi Aceh (BRA) dengan mengatasnamakan PETA.³⁰

Menurut catatan organisasi non pemerintah yang bekerja untuk isu Aceh, setidaknya ada 21 milisi di Aceh yang dibentuk pemerintah. Disebutkan 1) Front Perlawanan Separatis GAM, 2) Front Perlawanan Rakyat Aceh Republik Indonesia, 3) Front Penyelamat Aceh Republik Indonesia, 4) Laskar Pembela Negara Kesatuan Indonesia, 5) Gerakan Rakyat Anti Separatis Aceh. Masih ada lagi: 6) Benteng Rakyat Anti Separatis, 7) Front Perlawanan Pembela Rakyat Teuku Umar, 8) Gerakan Perlawanan Separatis GAM-Teuku Peukan, 9) Ormas Pembela NKRI, 10) Front Penyelamat Merah Putih, 11) Laskar Merah Putih Anti Gerakan Aceh Merdeka dan 12) Front Anti Gerakan Aceh Merdeka.³¹ Untuk wilayah Aceh Tengah, Front Perlawanan Separatis GAM pimpinan Syukur Kobath dan PETA pimpinan Tagore Abu Bakar adalah organisasi milisi yang terbesar.³²

Dari semua catatan itu, yang paling penting adalah bahwa Peristiwa Pondok Kresek disebutkan sebagai cikal bakal front anti-GAM.³³

Sarlito W Sarwono dalam Nanda, dkk menyebutkan bahwa menurut hasil penelitian di berbagai tempat dalam waktu yang berbeda, satu hal yang selalu muncul ketika terjadi konflik antar etnis di Indonesia adalah prasangka etnis yang selalu bersifat kontekstual, artinya setiap konflik selalu terkait dengan situasi dan kondisi tertentu.³⁴ Dalam kaitannya dengan konflik antaretnis di Aceh Tengah pada tahun 2001 ini, kesejahteraan dan tingkat ekonomi etnis tertentu yang lebih tinggi daripada etnis lain telah memicu kecemburuan dan syak wasangka, yang berujung pada kebencian kolektif.

³⁰ Ibid

³¹ Op.cit

³² Winar Sagita, Nanda, dkk, *Konflik Antar Etnis di Tanah Gayo: Tinjauan Interaksi Sosial Antar Etnis Jawa dan Etnis Aceh tahun 1989-2015*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 1 No 1, Oktober 2016, Hal. 59-79

³³ <https://kumparan.com/acehkini/perlawanan-di-kampung-kresek-aceh-cikal-bakal-front-anti-gam-1rjiISuxLyp/4>, diakses pada 30 Agustus 2022 pukul 18.09 PM

³⁴ Op.cit, hal. 67

Chauvinisme sebagai konsekuensi wajar dari usaha membela diri saat merasa bahwa identitas kultural terpojok, menambah kerumitan konflik di tanah Gayo. Akibatnya, rata-rata etnis Aceh dan Gayo menganggap bahwa etnis Jawa adalah pendatang yang merugikan karena merebut lahan pendapatan, sementara etnis Jawa menganggap semua anggota etnis Aceh dan Gayo selalu terkait dengan GAM, dan karenanya merupakan biang segala kerusuhan.³⁵

Dari kacamata lain, kecemburuan ekonomi ini bahkan dapat dianalisa berdasarkan teori Perangkap Thucydides. Thucydides adalah filsuf sekaligus jenderal Yunani yang menulis analisa tentang Perang Peloponnesia (konflik antara Athena dan Sparta) pada tahun 431-404 SM.

Istilah “Perangkap Thucydides” pertama kali di telurkan oleh ilmuwan politik Amerika Serikat, Graham T Allison. Allison mengatakan bahwa kecenderungan meletusnya konflik antara dua pihak selalu dipicu kekhawatiran salah satu pihak tentang berkembangnya kekuatan pihak lain.³⁶ Dalam hal ini, kecemasan etnis Aceh dan Gayo bahwa lahan usaha mereka akan dilibas etnis pendatang yang secara signifikan menampakkan kenaikan dalam tingkat kemakmuran serta menguasai banyak sektor ekonomi, memicu ketegangan yang berakhir pada konflik.

Ketegangan berbasis etnis di Aceh Tengah bertambah dengan adanya pernyataan dari pihak milisi, yang menyatakan bahwa Aceh Tengah termasuk Bener Meriah dan Gayo Lues bukan daerah perjuangan bagi orang Aceh.³⁷ Sedangkan bagi GAM, Aceh adalah sebuah negara berdaulat yang kemudian diserahkan Belanda kepada pemerintahan baru bernama Indonesia, padahal Aceh tidak pernah takluk pada Belanda. Penyerahan itu dianggap ilegal karena tanpa melalui lembaga atau wakil resmi rakyat Aceh.³⁸

Sesuai pernyataan tersebut, ini berarti seluruh wilayah Provinsi Aceh adalah daerah perjuangan bagi orang Aceh. Karuan, pernyataan milisi bahwa Aceh

³⁵ Op.cit, hal. 67

³⁶ <https://study.com/learn/lesson/thucydides-trap-overview-theory-historical-examples.html> diakses pada 25 September 2022 pukul 11.20 AM

³⁷ Ibid

³⁸ HU Kompas, *GAM Jawab Surat Enam Senator AS*, terbit 8 Juni 2001

Tengah bukan daerah perjuangan bagi orang Aceh adalah seperti percik korek di tengah gudang mesiu.

Pasca peristiwa Pondok Kresek dan Pepedang, pada 12 Juni 2001 puluhan rumah penduduk desa Uning Baru dan Puting, Kecamatan Timang Gajah, hangus dilalap si jago merah. Sekitar 1000 orang terpaksa mengungsi ke Gedung DPRD Aceh Tengah. Sembilan warga Kecamatan Bandar dilaporkan tewas. Mereka warga Gunung Jati, Linung, dan Pondok Keramat. Lima warga yang tewas di Desa Linung beretnis Jawa dan telah lama mendiami kawasan pegunungan itu. Sedangkan empat korban gorok dan bacok di Pondok Keramat merupakan etnis Gayo yang masih saling bersanak keluarga.³⁹

Juru bicara GAM Wilayah Linge, Teungku Win Rime Raya, menyatakan bahwa mereka (GAM) bukan hanya menyerang aparat keamanan, tapi juga milisi (warga setempat) yang telah dilatih aparat keamanan. Alasannya karena milisi secara sistematis telah melakukan pembunuhan, pembakaran rumah penduduk, serta merampas harga benda bangsa Aceh.⁴⁰

Mantan Panglima GAM Wilayah Linge, Fauzan Azima, dalam buku memoarnya, *Sang Gerilyawan*, menuturkan tentang penyerangan Pos TNI di Buntul Kemumu pada pertengahan tahun 2001. Disebutkan, keresahan masyarakat akibat adanya pos itu adalah motivasi utama penyerangan.⁴¹ Waktu meletusnya penyerangan Pos TNI Buntul Kemumu dan Peristiwa Pondok Kresek sama-sama pada pertengahan tahun. Namun, dikatakan Azima, penyerangan ke Pondok Kresek bukanlah penyerangan terkoordinasi. Dirinya sebagai panglima, tidak mengetahui adanya rencana tersebut. Ia juga mengatakan, bahwa sayap militer GAM memiliki mekanisme peradilan serta penegakan hukum sendiri bagi anggota yang melanggar aturan atau perintah.⁴²

Selepas segala peristiwa memilukan itu, usaha menghadirkan kembali damai

³⁹ HU Waspada, Medan, *Aceh Tengah Tegang Pembakaran Berlanjut Sembilan Lagi Tewas*, terbit 13 Juni 2001

⁴⁰ Ibid

⁴¹ Azima, Fauzan, *Sang Gerilyawan*, Penerbit Kosakata Kita, Jakarta: 2022, Hal 103

⁴² Wawancara dengan Azharul Husna, 6 September 2022

di Aceh Tengah, bukan tak pernah dilakukan. Pada 28 Juli 2006 bertempat di Redelong, kini ibukota Kabupaten Bener Meriah, diadakan sebuah acara merajut damai bertajuk “Ikrar Musara Pakat”. Dikatakan, Ikrar Redelong yang ditandatangani pimpinan PETA dan GAM, sesungguhnya selaras dengan butir-butir kesepakatan MoU Helsinki dan selayaknya dijadikan pijakan untuk proses rekonsiliasi di tingkat masyarakat di Bener Meriah.⁴³

Rekonsiliasi, dalam koridor istilah HAM, adalah tahap setelah terjadinya perdamaian, dimana perhatian utamanya adalah upaya memulihkan keselarasan di tengah masyarakat yang dulu bertikai.

KontraS menilai bahwa kendati perdamaian Aceh telah memasuki usia 15 tahun, namun upaya pemulihan bagi para korban pelanggaran HAM masa lalu masih harus menempuh jalan panjang. Hak-hak korban seperti hak atas kebenaran, hak atas keadilan, hak atas pemulihan dan hak atas ketidakberulangan, masih belum berhasil disampaikan pada para korban.

Fauzan Azima, yang turut meneken Ikrar Redelong, mengingatkan bahwa tanpa rekonsiliasi di akar rumput, potensi konflik berulang tetap ada di sejumlah tempat. Ia menyebut beberapa tempat di Aceh Tengah yang memiliki potensi konflik, seperti Bur Lintang, Uyem Pepongoten, Cot Panglima, Wih Kanis, Wih Konyel, Tajuk Enang-enang, serta beberapa daerah lain. Daerah-daerah ini telah sering menjadi saksi bisu perang tak berkesudahan, yang merentang sejak masa kolonial Belanda hingga masa konflik antara GAM dengan Pemerintah RI.⁴⁴ Meledaknya Tragedi Atu Lintang⁴⁵ di Kecamatan Linge pada Maret 2008 seolah mengonfirmasi peringatan Azima. Tragedi yang memakan korban lima mantan kombatan GAM itu berawal dari rebutan rezeki lahan parkir antara anggota KPA dan PETA. Cukup jelas, di tingkat tapak, api konflik ternyata masih merah panas, seperti api kebakaran di lahan gambut: seolah telah padam, namun

⁴³ <https://acehkita.com/semua-pihak-perlu-mendukung-upaya-rekonsiliasi-demi-perdamaian-aceh-yang-ideal/> diakses pada 12 September 2022 pukul 10.47 AM

⁴⁴ <https://aceh.tribunnews.com/2022/03/30/eks-gam-dan-pe-ta-duduk-bersama-kontras-tindak-lanjut-ikrar-musara-pakat-redelong?page=all> diakses pada 12 September 2022 pukul 10.57 AM

⁴⁵ <https://regional.kompas.com/read/2008/03/06/17035415/23-orang-ditangkap-terkait-kasus-atu-lintang> diakses pada 25 September 2022 pukul 12.56 PM

sesungguhnya masih terus meretih-retih.

Dalam usaha mendekatkan para korban pelanggaran HAM masa silam di Bener Meriah pada hak-haknya, fasilitator menggagas satu model rekonsiliasi, yakni rekonsiliasi akar rumput. Model rekonsiliasi ini berdasarkan pada apa yang telah pernah dilaksanakan di masyarakat, serta berbasis kearifan lokal.

Selama beberapa tahun, KontraS melakukan kerja-kerja pendekatan pada berbagai pihak, guna memuluskan usaha rekonsiliasi berbasis kearifan lokal ini. Dinilai, kearifan lokal yang tumbuh dari budaya, adat serta pengalaman hidup masyarakat setempat, adalah sumber paling otentik untuk mencari dan mengembangkan metode paling tepat bagi usaha merajut perdamaian.

Memikat Merpati Putih Terbang Pulang

Usaha Merintis Rekonsiliasi



Usaha merintis rekonsiliasi

Jalan panjang menuju rekonsiliasi berpijak pada keinginan para pihak yang terlibat, untuk menghindarkan anak-cucu dari kengerian yang pernah mereka alami. Seperti yang diakui baik oleh Sutrisno dari pihak Pondok Kresek, mau pun Fauzan Azima dari GAM Wilayah Linge.

Patut diingat, ketika membicarakan konflik horizontal, kita tak dapat memisahkan korban dan pelaku dalam dua kategori yang kaku atau hitam putih. Sebab, dalam puncak konflik, tak ada musuh maupun sekutu abadi. Pelaku (kekerasan) adalah korban, dan korban (kekerasan) adalah pelaku, Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, Pasal 1 angka (3) dan Pasal 1 angka (5) mendefinisikan korban sebagai berikut:

(Korban adalah) Orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban dan abli warisnya.

Hal ini juga berlaku selama konflik yang berkecamuk di Aceh Tengah. Sutrisno sebagai Reje Pondok Kresek pada saat peristiwa, rumahnya dibakar dan harta bendanya musnah. Penduduk lain, Karyanto, bahkan kehilangan sekaligus dua anggota keluarga, yaitu ayah dan anak kandungnya. Keduanya meninggal terkena tembakan. Disamping itu harta benda Karyanto termasuk surat-surat berharga seperti akte kelahiran, juga musnah dalam rangkaian pembumihangusan desanya. Di pihak GAM, Fauzan Azima sendiri misalnya, ayahnya ditangkap dan ditahan. Ibunya mengalami trauma berkepanjangan. Selain itu rumah Fauzan Azima dibakar habis, istri dan anaknya yang masih merah harus mengungsi dan bersembunyi di sebuah tempat di Jakarta.

Dengan demikian, tercipta suatu kondisi serba-salah yang menempatkan masing-masing pihak ke dalam kecurigaan dan rasa tidak percaya, satu sama

lain. Perasaan bahwa mereka mengalami ketidakadilan, bercampur dengan rasa tidak berdaya menghadapi keadaan.

Situasi serumit ini memerlukan strategi dan pendekatan khusus untuk mencapai tujuan rekonsiliasi. Namun, mengungkap rekonsiliasi jauh dari mudah, karena membutuhkan sekian banyak elemen yang kerap kali sulit untuk dipenuhi.

Untuk dapat memahami mengapa rekonsiliasi adalah bagian vital namun sangat sulit dari suatu proses perdamaian, kita harus menengok definisinya lebih dulu.

REKONSILIASI



VITAL NAMUN SULIT

Dalam Qanun Aceh No 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, definisi rekonsiliasi adalah *hasil dari suatu proses pengungkapan kebenaran, pengakuan, dan pengampunan, dan penerimaan kembali korban dan pelaku oleh komunitas, melalui KKR Aceh dengan menggunakan mekanisme adat Aceh dalam rangka menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia untuk terciptanya perdamaian dan persatuan bangsa.*

Sedangkan menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia termasuk juga merekomendasikan reparasi. Reparasi adalah *hak korban atas perbaikan atau pemulihan yang wajib diberikan oleh negara kepada korban karena kerugian yang dialaminya, baik berupa restitusi, kompensasi, rehabilitasi, jaminan ketidakberulangan dan hak atas kepuasan.*⁴⁶

⁴⁶ Qanun Aceh No 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh

Dari hasil pengamatan dan pengalaman di lapangan selama ini, masyarakat di tingkat akar rumput adalah lapisan masyarakat yang paling terdampak, dan paling memerlukan suatu mekanisme yang dapat meredam rasa ketidakadilan serta ketidak berdayaan yang ditinggalkan konflik horizontal. Mengacu pada Qanun Aceh No 17 Tahun 2013, mekanisme adat Aceh harus digunakan sebagai media rekonsiliasi.

Adapun tujuan rekonsiliasi adalah: a) merajut kembali persaudaraan yang terpecah dan menghilangkan dendam antara korban/keluarga korban dan pelaku dalam rangka memperkuat keutuhan masyarakat dan bangsa; b) membangun kebersamaan untuk menjaga keberlanjutan perdamaian; c) mencegah berulangnya konflik; dan d) menjaga keutuhan wilayah Aceh.⁴⁷

Dalam rentangan panjang sejarah Aceh, peristiwa semacam rekonsiliasi antara Pemerintah dan masyarakat Aceh telah pernah dilaksanakan. Pada 18-21 Desember 1962 di lapangan Blang Padang, Banda Aceh, diselenggarakan sebuah perhelatan untuk rekonsiliasi antara pihak DI/TII Daud Beureueh dengan Pemerintah RI. Jalan rekonsiliasi ini bertajuk Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh.

Terkait dengan konflik di Aceh Tengah, kita tahu bahwa pada 2006 telah ada Ikrar Musara Redelong. Bila Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh dianggap cukup berhasil mengatasi masalah DI/TII di Aceh, maka Ikrar Musara Redelong dikatakan tidak menyentuh akar rumput, yaitu mereka yang sebenarnya paling merasakan kerasnya konflik. Maka, berdasarkan pengamatan lapangan, KontraS memutuskan mengambil pendekatan rekonsiliasi berbasis kearifan lokal, dengan sasaran masyarakat di tingkat tapak. Keputusan ini juga diambil berdasarkan berbagai komunikasi dan wawancara dengan masyarakat, yang merasa bahwa mereka seharusnya terlibat dalam seluruh rangkaian proses rekonsiliasi.

Bila mengacu pada Qanun Aceh No 17 Tahun 2013, rekonsiliasi yang dilakukan dengan memenuhi persyaratan bahwa upaya ini dilakukan secara

⁴⁷ Qanun Aceh No 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh

sukarela tanpa paksaan baik kepada korban maupun pelaku, harus juga menaati beberapa ketentuan. Yaitu, antara lain, mempertemukan dan melakukan mediasi, pelaku memohon maaf kepada korban secara terbuka dan dijawab dengan pernyataan penerimaan maaf oleh perwakilan korban secara terbuka pula. Pernyataan permohonan maaf dilakukan secara individual dan dinyatakan diterima oleh korban atau perwakilan korban.

Perintisan jalan dan pra-kondisi rekonsiliasi untuk peristiwa Aceh Tengah dimulai pada tahun 2018. Dengan pertimbangan bahwa ada beberapa elemen penting dalam pra kondisi pemulihan dan rekonsiliasi yang tidak dapat dilakukan oleh KontraS akibat ketiadaan sumber daya, diputuskan untuk bekerja sama dengan pihak lain.

Dalam hal pemulihan psikologis untuk korban, KontraS bermitra dengan Yayasan Pulih Aceh, sementara di bidang perlindungan hukum dengan LBH Banda Aceh. Desain awal prakondisi rekonsiliasi adalah, pendekatan psikologis sekaligus usaha pemulihan pada korban akan dilakukan sepenuhnya oleh Yayasan Pulih Aceh. Sedangkan pendataan korban serta pengambilan pernyataan dilakukan oleh pihak Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, yang memang memiliki kewenangan, sarana dan prasarana untuk mengerjakannya. Sebagaimana kita ketahui, salah satu syarat diadakannya rekonsiliasi adalah, tersedianya data valid korban, yang bersedia bersaksi dan telah diambil pernyataannya.

Pada awal program, KontraS mendata tiga desa sebagai wilayah potensial untuk mengadakan rekonsiliasi. Ketiga desa tersebut adalah: 1) Sedie Jadi (dahulu Pondok Kresek), 2) Makmur Sentosa, dan 3) Pilar Jaya.

Pemilihan ketiga desa ini didasari hasil penelusuran, dan diketahui bahwa pernah ada peristiwa kekerasan terkait konflik di dua desa yang secara administratif telah ada sejak masa konflik. Sementara satu desa lagi ternyata merupakan desa baru hasil pemekaran, yang terbentuk pasca perdamaian, namun berupa melting pot, yaitu tempat berkumpulnya komunitas masyarakat yang desa asalnya mengalami kehancuran akibat konflik.

Dari kedua desa yang menjadi kandidat rekonsiliasi, desa Sedie Jadi menjadi

calon terkuat. Hal ini karena sebagian besar masyarakat di desa ini bersedia untuk bersaksi secara mendetail. Mereka juga tidak memiliki kendala psikologis yang cukup berarti guna menyebutkan secara jelas dan tidak ditutup-tutupi, tentang pihak mana yang pada 2001 mengadakan penyerbuan ke desa mereka. Disamping itu, faktor lain yang juga tak kalah penting adalah kesediaan masyarakat Sedie Jadi untuk “menolak lupa,” dengan mengadakan memorialisasi Peristiwa 5 Juni 2001 berupa sebuah tugu yang dibangun di tengah desa.

Hal ini penting karena dalam banyak peristiwa pelanggaran HAM di Aceh, rekonsiliasi sulit dilakukan karena korban enggan mengingat apa yang terjadi pada diri dan keluarganya di masa lalu. Rasa takut, trauma, bahkan juga ajaran agama Islam yang dianut sebagian besar orang Aceh, menjadikan korban memilih untuk diam, atau memaafkan (lebih tepat “melupakan”) peristiwa di masa lalu itu.

Dari hasil penelusuran, tidak sedikit korban dan keluarga korban yang mengatakan bahwa mereka sudah “memaafkan” pelaku karena “ajaran agama menyatakan tidak baik menyimpan dendam,” atau “saya ingin keluarga saya yang sudah meninggal (menjadi korban) itu tenang di alam kubur,” serta “tidak ingin mengingat lagi peristiwa itu.”⁴⁸

Terkait peristiwa penyerbuan dan pembakaran desa di Aceh Tengah, penduduk desa selain Sedie Jadi hanya bersedia menyebutkan bahwa penyerang dan pembakar desa adalah OTK atau Orang Tak Dikenal. Istilah Orang Tak Dikenal tentu saja menunjuk pada seseorang atau sekelompok orang yang identitasnya tidak diketahui. Sementara kita tahu, rekonsiliasi hanya dapat dilakukan bila para pihak yang hendak dipertemukan identitas dan perannya dalam konflik telah jelas.

Tidak dapat dikesampingkan, bahwa konflik di Aceh Tengah memiliki aspek khas, yaitu adanya kelompok-kelompok milisi dengan jumlah anggota yang cukup signifikan. Walau pun pada tingkatan pengambil keputusan di Pemerintah RI dan pihak TNI/Polri keberadaan milisi masih berupa isu

⁴⁸ Wawancara dengan petugas pengambilan pernyataan KKR Aceh, Juli 2020

yang menjadi silang sengketa, namun di lapangan masyarakat berbicara lain. Bagi mereka, Milisi adalah fenomena nyata yang keberadaannya dapat dibuktikan.

Karena itu, dalam strategi pendekatan untuk rekonsiliasi, eks kelompok milisi termasuk dalam kelompok yang diajak berdialog. Pendekatan dilakukan terhadap kelompok milisi dengan anggota terbanyak yaitu PETA, dengan pertimbangan bahwa keberadaan kelompok ini diakui oleh pihak TNI/Polri, meski dengan penyebutan sebagai “PAM (Pengamanan) Swakarsa.” Selain itu, Sutrisno sebagai mantan Reje Pondok Kresiek pernah menjabat Wakil Ketua PETA.

Pada pendekatan awal, masyarakat desa sasaran bersikap skeptis. Sementara untuk pihak yang berlawanan, belum dapat ditemukan pihak GAM yang bersedia melakukan rekonsiliasi.

Kesulitan utama dalam hal ini adalah harus terpenuhinya unsur “pelaku menyatakan secara terbuka kesalahan kebijakan atau perintah yang diberikannya sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM.”⁴⁹ Dari beberapa pihak GAM yang ditemui, tidak ada yang menyatakan secara jelas bahwa penyerangan dan pembakaran desa di Aceh Tengah adalah tanggung jawab mereka. Karena dalam rekonsiliasi terdapat asas kesukarelaan yang harus dipenuhi, maka perintisan jalan menuju damai ini memakan waktu yang cukup lama, tak kurang dari dua tahun.

Untuk mengurangi sikap skeptis dan penolakan dari kedua pihak, digunakan berbagai taktik dan cara. Antara lain dengan menggunakan bahasa terukur yang bersifat netral dan tidak mengandung sangkaan apa pun kepada pihak mana pun.

Misalnya, sebutan “korban” dan “pelaku” dihindari bahkan tidak digunakan sama sekali. Yang digunakan adalah istilah “para pihak.” Hal ini, seperti yang telah disebut di atas, dilandaskan pada kenyataan bahwa dalam sebuah konflik seringkali tidak ada batasan jelas antara yang mana korban

⁴⁹ *Op.cit* Pasal 36

dan yang mana pelaku. Ketidakjelasan batas ini mengakibatkan penyebutan yang mengandung sangkaan seperti “korban” dan “pelaku” dapat menimbulkan ketersinggungan bagi pihak tertentu. Yang buntut-buntutnya akan semakin menghalangi proses rekonsiliasi.

Pada masa perintisan ini juga terdapat force majeure yang tidak dapat dihindarkan yaitu pandemi COVID-19. Program PPKM (Program Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang dijalankan Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah RI dalam beberapa gelombang, membuat kegiatan ke daerah selama satu tahun praktis terhenti.

Terhentinya kegiatan lapangan membuat program harus dijalankan tanpa melibatkan kegiatan serupa. Karenanya, selama satu tahun pendekatan dilakukan pada pihak GAM melalui sambungan telepon. Pada prinsipnya, walau pun secara fisik tak ada kemungkinan untuk bertemu dengan kedua pihak, namun komunikasi dilakukan terus menerus dan tidak terputus. Hal ini penting untuk membangun dan membina keterbukaan serta rasa saling percaya, baik antara fasilitator maupun antara para pihak.

Sementara itu, peluang terbukanya jalan menghadirkan pihak GAM ke dalam rencana rekonsiliasi adalah ketika mantan Panglima Wilayah Linge bukan saja dapat dan bersedia dihubungi secara intens, namun ia juga membuka diri untuk kemungkinan rekonsiliasi.

Yang penting dikemukakan di sini adalah alasan serta motivasi yang mendasari keinginan dan kebersediaan Fauzan Azima serta Sutrisno, untuk terlibat dalam rekonsiliasi. Baik Fauzan Azima mau pun Sutrisno sama-sama menyatakan tekad mereka untuk menyediakan jaminan bagi anak-cucu mereka, bahwa Peristiwa 5 Juni takkan berulang. Nilai positif semakin bertambah dengan inisiatif Fauzan Azima untuk memberikan restitusi.

Pembicaraan baik dengan Fauzan Azima mau pun tokoh-tokoh Pondok Kresek tidak seketika membahas rencana rekonsiliasi. Pendekatan secara informal kerap dilakukan. Di masa konflik, elemen yang hilang dalam hubungan sosial antara sesama manusia adalah rasa kasih sayang, saling percaya dan persahabatan. Untuk memulihkannya, diperlukan waktu dan

pendekatan dari hati ke hati. Pendekatan seperti ini akan kembali memperkuat dasar saling percaya, serta keyakinan akan kesamaan maksud dan tujuan masing-masing.

Merpati Putih Nyaris Gagal Terbang Pulang

Rangkaian Proses Pengkondisian Rekonsiliasi



Rangkaian proses pengkondisian rekonsiliasi

Dalam serangkaian pertemuan yang terjadwal dan kontinyu, Fauzan Azima mengemukakan pentingnya klarifikasi pada semua pihak, tentang mengapa desa yang dipilih untuk mengadakan rekonsiliasi adalah Sedie Jadi (Pondok Kresek). Menurut Azima, pada saat itu desa yang mengalami kerusakan, penjarahan dan pembakaran bukan hanya Pondok Kresek. Ia menyebutkan banyak desa lain yang mengalami kehancuran, termasuk peristiwa pembunuhan dan kekerasan lain terhadap warganya. Azima juga menekankan perlunya klarifikasi, mengapa dari pihak GAM diwakili oleh dirinya. Semua itu penting untuk menghindari kesalahpahaman serta meletiknya bara api lain, yang sangat rentan kembali menyala.⁵⁰

Komunikasi yang dilakukan tidak terbatas pada pihak GAM/KPA, Pondok Kresek dan PETA. KontraS sebagai fasilitator juga mengadakan komunikasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, serta KKR Aceh. KKR Aceh terlibat pada masa awal program, dengan proses pengambilan pernyataan pada korban. Di lapangan, fasilitator bekerja sama dengan KPCD (Kelompok Perempuan Pecinta Damai) untuk mengkondisikan desa-desa yang dijadikan sasaran pra-kondisi rekonsiliasi.

KPCD adalah kelompok binaan KontraS, yang terdiri atas kaum perempuan dari beberapa desa. Mereka bukan saja korban konflik, namun juga kaum perempuan yang tidak ingin konflik berulang.

KPCD melakukan dialog dengan penduduk, mendata desa-desa yang memiliki visi serta kesediaan untuk mengadakan rekonsiliasi, juga mengumpulkan data penduduk yang bersedia melakukan rekonsiliasi. Melalui dialog-dialog ini pula fasilitator menggali harapan, keinginan dan hal-hal yang dibutuhkan masyarakat, agar dapat melaksanakan rekonsiliasi. Dari hasil dialog dan pendataan, ditemukan bahwa di desa Pilar Jaya terdapat 10 korban, desa Makmur Sentosa 25 orang dan Sedie Jadi 18 orang.

⁵⁰ Rekaman pembicaraan Fauzan Azima dengan perwakilan KontraS, Bener Meriah, Januari 2022

Tidak dipungkiri, proses pra-kondisi ini kerap mengalami hambatan. Misalnya, ketika fasilitator mengkomunikasikan bahwa pihak GAM diwakili KPA/Fauzan Azima, pada awalnya mereka kurang dapat menerima. Alasannya karena Fauzan Azima bukan sosok orang yang menyerbu desa mereka pada 2001. Dari pihak GAM, kendala datang ketika tidak ada kesediaan mengakui bahwa ada kesalahan, baik kesalahan memberikan perintah mau pun menafsirkan perintah dari mereka, yang menyebabkan terjadinya kekerasan dan jatuhnya korban.

Sepanjang proses pengkondisian, KontraS berkali-kali melakukan pendekatan pada pihak GAM. Dan beberapa kali, pendekatan itu seperti menabrak tembok sehingga fasilitator harus mencari tokoh GAM lain dan mengulang seluruh proses pendekatan.

Dari hasil pendekatan selama dua tahun, kebanyakan tokoh GAM yang didekati menganggap bahwa rekonsiliasi di tingkat tapak itu tidak seberapa penting. Mereka tidak menganggap bahwa permohonan maaf secara resmi adalah salah satu cara menciptakan dan memelihara perdamaian, atau sebuah resolusi. “Yang penting pembangunan ekonomi,” begitu pernyataan mereka.⁵¹ Dengan kata lain, bila roda ekonomi berjalan lancar, maka semua problem, termasuk masalah SARA yang masih kerap mengemuka setiap kali Pemilu, atau bahkan pemilihan Reje sekali pun, akan menghilang dengan sendirinya.

Berkali-kali fasilitator mendapat harapan bahwa pihak GAM yang didekati akan menyetujui konsep resolusi dengan rekonsiliasi. Namun berkali-kali juga hal tersebut gagal. Ada tokoh yang pada awalnya menunjukkan sikap positif, tetapi kemudian berbalik menentang. Tokoh lainnya memiliki ayah mertua yang menjabat Gubernur GAM, dimana sang mertua menganggap bahwa rekonsiliasi sangat penting dan urgent. Ia menganggap, kalau perlu ‘upacara’ rekonsiliasi harus dibuat besar-besaran. Tetapi menantunya berlainan pendapat, dan tetap tidak bersedia melaksanakan rekonsiliasi.

Bila dirunut ke masa awal perdamaian pada 2005, sikap skeptis GAM

⁵¹ Wawancara dengan Azharul Husna, 6 September 2022

berbanding lurus dengan sikap milisi. Setelah kabar baik tentang ditekenya MoU Helsinki menyebar, sikap aparat TNI/Polri berubah 180 derajat, menjadi jauh lebih cair. Namun, sikap ini tidak ditemui pada kelompok milisi. Kelompok ini masih menolak damai. Mereka menginginkan agar GAM menyerahkan diri pada mereka, dan bahkan masih berusaha melakukan provokasi. Hal-hal seperti ini dilaporkan mantan kombatan GAM pada Aceh Monitoring Mission, dengan tujuan jangan sampai perdamaian jadi rusak.⁵²

Tak dapat dipungkiri, memori pada hal-hal ini masih sangat mewarnai ingatan. Bawah sadar masyarakat, bahkan tokoh-tokoh PETA dan GAM sekali pun, masih menyimpan rasa curiga dan kecemasan tinggi. Hingga bahkan terdapat peristiwa dimana ketika seorang eks-PETA dan mantan kombatan GAM ditempatkan dalam satu kamar hotel pada suatu kesempatan acara, keduanya tak dapat tidur karena diam-diam memendam cemas, bahwa kawan sekamarnya akan membunuhnya.⁵³

Akhirnya, setelah dua tahun dan setelah fasilitator berkali-kali patah hati, muncul nama Fauzan Azima. Nama ini muncul karena diketahui, dialah yang menjabat sebagai Panglima Wilayah Linge ketika Peristiwa Pondok Kresek terjadi.

Fauzan Azima, putra Gayo kelahiran Pondok Sayur, Kecamatan Bukit, melanjutkan sekolah di Jakarta sebelum bergabung dengan GAM pada 1998. Namanya diambil dari kalimat “fauzan azhima”, yang disebutkan beberapa kali dalam Al Quraan, antara lain dalam surah Al Fath ayat 5. Arti nama ini adalah “kemenangan yang besar”.

Ia menghabiskan masa kecil di desa Pondok Sayur dan desa Panji Mulia II, di tengah masyarakat mayoritas Jawa. Di desanya, penduduk etnis Gayo atau Aceh justru tak banyak. Penduduk Jawa di sini, kata Azima, bukan transmigran, melainkan keturunan Jawa Kontrak. Azima bahkan pandai berbahasa Jawa kasar, karena pengaruh lingkungannya ini. Bersama

⁵² Azima, Fauzan, *Sang Gerilyawan*, Penerbit Kosa Kata Kita, Jakarta: 2022, Hal. 377-378

⁵³ Ibid

kawan-kawannya, Azima kecil kerap menonton pertunjukan ludruk yang diadakan di Balai Desa Panji Mulia I, hingga larut malam. Perbedaan suku dan bahasa tidak menjadi penghalang dari persaudaraan mereka.⁵⁴

Kontak dan pertemuan awal KontraS dengan Fauzan Azima, yang sebagai Panglima Linge dikenal dengan nama Teungku Gajah Puteh, menunjukkan gejala baik. Pria yang pernah bekerja sebagai jurnalis selama beberapa tahun di Jakarta ini bersikap terbuka pada pilihan rekonsiliasi. Pada saat bara api konflik tengah mencapai titik tertinggi, keluarganya mendapat teror dan tekanan berat. Ayahnya dipenjarakan, dan ibunya, saat itu menjabat Kepala di sebuah Sekolah Dasar, terkena wajib lapor ke Kodim 016 Aceh Tengah, setiap hari dua kali. Sekali sebelum mengajar, sekali lagi setelah pulang dari sekolah.

Lepas dari tekanan mental dan kerugian harta yang dialami diri dan keluarganya, sikap Azima tentang perdamaian jelas. Keinginan untuk mengibarkan perdamaian sejati sudah ditunjukkan Azima sejak 2005. Ia, misalnya, mengajarkan pada pasukannya untuk tidak mendendam. Di masa awal perdamaian, ia juga langsung menghubungi semua pasukan di wilayah Gayo Alas, Batee Ilikek, Aceh Rayeuk dan Pasee untuk mendiskusikan langkah integrasi dengan masyarakat, termasuk membahas sikap para kombatan GAM terhadap milisi.⁵⁵

Azima berpendapat bahwa *“Perang itu seperti mimpi panjang yang tidak berakhir. Tidak peduli seberapa kuat kita berusaha bangun, mimpi buruk itu terus menyeret kita ke tempat dan situasi yang tidak pernah kita harap. Karena itulah, perdamaian Aceh harus terus dijaga. Perdamaian lah yang membangunkan kita dari situasi buruk itu”*.⁵⁶ Ia juga berpendapat, potensi gangguan dan ancaman terhadap perdamaian yang hingga kini belum padam sepenuhnya adalah perpecahan antarkampung. Jika ingin perdamaian di Aceh langgeng, kohesi antarmasyarakat harus dipulihkan, perpecahan dan dendam harus dihapuskan.

⁵⁴ Ibid, Hal. 3-4

⁵⁵ Ibid, Hal. 377

⁵⁶ Ibid, Hal. 380

Sikap dan pemikiran Azima yang seperti ini, merupakan “pintu masuk” bagi fasilitator. Meski belum bertatap muka, namun komunikasi telah dibangun secara intensif melalui media komunikasi lain, seperti platform berbagi pesan, sejak pertengahan tahun 2021. Sedangkan pertemuan formal pertama antara tim KontraS Aceh dengan Azima terjadi pada Oktober 2021. Pertemuan di sebuah sekolah di kawasan Lhoong Raya, Aceh Besar, itu berlangsung selama dua jam. Obrolan berkisar seputar ketegangan masa konflik di Aceh Tengah, namun percakapan berlangsung santai. Setelah pertemuan pertama yang berlangsung cukup cair tersebut, pertemuan-pertemuan berikutnya sering diadakan. Termasuk berkali-kali pertemuan informal, yang menguatkan rasa saling percaya, seperti yang telah disebutkan terdahulu.⁵⁷

Meski sikapnya sejak awal positif dan kolaboratif, secara resmi Azima menyatakan setuju untuk ikut dalam proses rekonsiliasi baru pada awal tahun 2022. Setelah Pembatasan Kegiatan Masyarakat terkait pandemi COVID-19 dilonggarkan, barulah proses pengkondisian rekonsiliasi dapat kembali dilaksanakan di lapangan.

Pertemuan-pertemuan informal antara Fauzan Azima dan wakil dari Pondok Kresek, mulai dilakukan secara intensif. Pertemuan-pertemuan ini secara signifikan berhasil mengurangi ketegangan antara kedua pihak, karena dilaksanakan secara santai, di tempat-tempat yang menyenangkan dan bersuasana informal.⁵⁸

Sementara itu, komunikasi yang juga dibangun dengan pihak Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, kerap mengalami pasang surut. Dinamika pergantian pejabat di kalangan Kabupaten, sangat mempengaruhi pola sikap yang diambil pihak eksekutif terhadap rencana rekonsiliasi ini.

Awalnya, Bupati Bener Meriah, Tgk. H. Sarkawi, mendukung dan menyetujui keseluruhan rencana rekonsiliasi. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak, Bupati yang pernah menjabat sebagai Ketua MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Bener Meriah selama dua periode ini,

⁵⁷ Wawancara dengan Azharul Husna, 6 September 2022

⁵⁸ Ibid

mengalami serangan stroke pada 16 Mei 2021. Sementara ia dirawat di RS di Medan, jabatannya diisi oleh wakilnya, Dailami.

Ada pun Dailami alias Teungku Aci, adalah seorang anggota GAM. Ia pernah menjabat sebagai Gubernur GAM Wilayah Linge. Saat menjabat Plt Bupati, Dailami menunjukkan bahwa dirinya tidak setuju dengan rekonsiliasi. Ia berkeras melarang penggunaan istilah rekonsiliasi, bahkan juga melarang penyebutan kata ‘damai’ atau ‘perdamaian’, karena menurut persepsinya Aceh telah damai sejak 15 Agustus 2005, yaitu saat ditandatanganinya MoU Helsinki. Dailami juga merupakan salah satu tokoh GAM yang mempertanyakan, mengapa dari pihak GAM yang dipilih untuk memangku rekonsiliasi dengan masyarakat Pondok Kresek adalah Fauzan Azima.

Sikap Tgk Dailami menyebabkan proses rekonsiliasi sempat terkatung-katung selama beberapa bulan. Tidak adanya restu dari Plt Bupati tentu membuat rekonsiliasi terancam gagal.

Namun, ditengah ketidakpastian tersebut, komunikasi dengan Fauzan Azima dan wakil masyarakat Pondok Kresek tetap dijalankan. Fasilitator KontraS menghabiskan hari-hari kerja di Bener Meriah, dan kembali ke Banda Aceh diakhir pekan. Kepala Divisi Advokasi KontraS tinggal di Bener Meriah selama hampir setengah tahun, untuk membina komunikasi dengan masyarakat dan Pemerintah Bener Meriah.

Akselerasi ke arah pelaksanaan rekonsiliasi semakin intensif setelah mendekati bulan Ramadhan 2022, yang jatuh pada bulan April. Di Bulan Februari 2022, Fauzan Azima menyatakan keinginannya untuk segera bertemu dengan masyarakat Pondok Kresek dan melaksanakan rekonsiliasi. Sebab, menurut Azima, ia ingin memasuki Bulan Suci Ramadhan dengan kondisi batin yang telah bersih, disucikan dari kesalahan-kesalahan dan dosa. Ia juga menyatakan keinginannya untuk dapat “pulang kampung” ke Kecamatan Bukit. Sebagaimana tradisi umat Islam di Aceh sebelum melaksanakan ibadah shaum Ramadhan, Azima ingin dapat pulang dengan hati lega, tidak terganjal perasaan tak nyaman dalam bentuk dendam, sakit hati atau apa pun.

Gayung bersambut, hal senada dinyatakan Sutrisno sebagai wakil masyarakat Pondok Kresek. Penerimaan akan rencana rekonsiliasi juga diutarakan oleh Karyanto.

Maka pada proses rekonsiliasi, pihak Pondok Kresek diwakili Sutrisno sebagai mantan Reje, Karyanto sebagai warga yang mengalami kehilangan sangat besar pada peristiwa itu, dan Radinal dari PETA. Sejak awal pengkondisian, walau pun ia dahulu menjabat sebagai Wakil Ketua PETA, namun pada perintisan jalan rekonsiliasi ini Sutrisno tidak bertindak mewakili PETA, melainkan sebagai wakil masyarakat Pondok Kresek.

Sementara itu di pihak GAM, selain Fauzan Azima, pertemuan demi pertemuan juga dihadiri oleh Mustawalad dan Ibnu Sa'dan. Pada pertemuan pertama pihak Fauzan Azima dengan wakil masyarakat Pondok Kresek, Karyanto lebih dulu mengenali mantan Panglima Linge itu sebagai kawan sekelasnya di MIN Pondok Sayur, dan kemudian di Madrasah Tsanawiyah Simpang Tiga. "Mantan-mantan (pacar)nya saja saya tahu," canda Karyanto, menegaskan betapa kentalnya persahabatan mereka semasa remaja. Pertemuan tanggal 4 Januari itu disusul beberapa pertemuan lain dalam rangka mempersiapkan rekonsiliasi.

Untuk sementara, waktu upacara rekonsiliasi direncanakan akan diadakan pada tanggal 24 Maret. Kesediaan pihak GAM untuk membangun komunikasi membuat KontraS sebagai fasilitator gembira sekaligus berdebar-debar, karena belum ada lampu hijau dari pihak Plt Bupati Bener Meriah.

Akhirnya, tanda positif yang dinanti-nanti itu tiba juga. Pada 8 Maret 2022, Plt Bupati Dailami mengatakan untuk melanjutkan proses rekonsiliasi. "Bismillah, jalankan terus," katanya dalam pertemuan dengan KontraS.

Alasan perubahan sikap Plt Bupati tidak diketahui dengan jelas, meski pun ada dugaan bahwa Asisten I Setdakab pada saat itu, M Nasir, mempunyai andil besar dalam hal ini. Asisten I adalah pejabat di lingkungan Pemda Bener Meriah yang cukup sering berkomunikasi dengan pihak fasilitator.

Persiapan rekonsiliasi segera dilanjutkan. Tanggal untuk acara yang akan

diselenggarakan dengan berbalut kearifan lokal ini, ditetapkan pada tanggal 24 Maret 2022. Tanggal tersebut dipilih karena bertepatan dengan peringatan Hari Hak Untuk Kebenaran. Namun, tiga hari sebelum tanggal rencana pelaksanaan rekonsiliasi, Ketua KKR Aceh Masthur Yahya menyatakan bahwa KKR Aceh menarik diri dari proses rekonsiliasi ini.

Masthur Yahya menyatakan bahwa alasan lembaganya menarik diri dari dari rekonsiliasi adalah karena adanya “masukan” dari Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh. “Karena melibatkan Pemerintah Pusat, maka DPR Aceh memandang dan meminta agar komunikasi-komunikasi teknis antarlembaga yang terkait dengan institusi seperti KPA, kemudian Pangdam, agar lebih diintensifkan, dimatangkan terlebih dahulu,” demikian Masthur.⁵⁹

Keputusan KKR Aceh menarik diri menyebabkan penyelenggaraan rekonsiliasi yang sedianya akan diemban oleh Negara, dalam hal ini KKR Aceh, mendadak direduksi menjadi rekonsiliasi berbasis komunitas. Undangan pada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, terpaksa direvisi, karena tidak lagi relevan dengan rekonsiliasi berbasis komunitas.

Kepala Divisi Advokasi KontraS, Azharul Husna, saat pihaknya menghubungi, Ketua KKR Aceh, mengatakan bahwa KKR Aceh tidak dapat melanjutkan apa yang sudah dirintis karena “belum siap mengundang hingga ke tingkat nasional.” Sebaliknya, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menyatakan pihaknya telah sangat siap menyelenggarakan perhelatan rekonsiliasi ini.

“Dengan hadirnya Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, maka rekonsiliasi ini tetap dapat dikatakan sebagai diemban oleh Pemerintah,” kata Azharul Husna.

Maka perhelatan besar untuk merajut kembali kohesi warga masyarakat,

⁵⁹ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60939548> diakses pada 29 September 2022 pukul 01.56 AM

digelar pada 29 Maret, nyaris sepekan mundur dari tanggal semula. Sesuai kesepakatan antara para pihak di bulan Februari, rekonsiliasi berbasis kearifan lokal ini akan digelar menggunakan unsur-unsur campuran adat budaya Gayo, Aceh dan Jawa. Prosesi akan menghadirkan tari guel, peusijek (tepung tawar), diperdengarkan lagu tawar sedenge, pengangkatan saudara dengan penyelubungan kain upuh ulen-ulen, serta makan ambengan. Sebagai tambahan yang tak kalah penting, seekor lembu disembelih sebagai syarat tolak bala, sesuai adat masyarakat Bener Meriah.

Dalam upacara ini dibacakan sebuah ikrar kesepakatan damai, yang ditulis dan disepakati bersama oleh para pihak. Draft isi ikrar itu lebih dulu ditulis oleh masing-masing pihak. Kemudian para pihak bertukar draft yang ditulis, agar pihak lainnya dapat menimbang seluruh isi kesepakatan, dan mengajukan usul perubahan, jika dianggap perlu.

Ikrar yang akan dibacakan pada upacara rekonsiliasi dirancang bersama para pihak di sebuah kafe di Simpang Tiga Redelong pada 27 Maret 2022, juga disaksikan Koordinator KontraS Hendra Saputra, Komisioner KKR Aceh, Asisten I Setda Kab Bener Meriah Khairmansyah, Camat Kecamatan Bukit Ismail, dan Kepala Divisi Advokasi KontraS Azharul Husna.

Ikrar bersejarah itu berbunyi:

“Bismillaahir rahmaanir rahiim,

Dengan mengucap puji syukur ke hadirat ALLAH SWT dan salawat serta salam ke haribaan nabi besar Muhammad SAW. Dan merujuk Al Qur'an Surat Al Hujurat 10: “Sesungguhnya orang-orang muslim itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.”

Demi tegaknya harkat dan martabat manusia, terciptanya kehidupan yang lebih baik bagi generasi saat ini dan masa depan. Pada hari ini, Selasa, 29 Maret 2022, bertempat di Kampung Sedie Jadi, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, kami para pihak menyatakan sebagai berikut:

- 1. Bersepakat untuk senantiasa menjaga dan mempertahankan perdamaian serta persaudaraan yang sudah terbangun.*

2. Bersepakat untuk saling memaafkan atas apa yang terjadi pada masa lalu terutama dalam Peristiwa Pondok Kresek pada 5 Juni 2001.

3. Bersepakat untuk menghilangkan dendam dan memutuskan mata rantai kekerasan agar konflik tidak terulang kembali pada anak maupun cucu kami di masa depan. “Agih sibelem genap si nge munge.”

Ikrar ini kami sampaikan sebagai upaya merawat silaturahmi hingga ke masa depan. Semoga Allah SWT meridhai dan melindungi kita semua.

Bener Meriah, 29 Maret 2022

Para Pihak

Fauzan Azima

Sutrisno “



Pada saat itu, Fauzan Azima menyatakan bahwa dirinya adalah anggota GAM, dan secara resmi memohon maaf pada masyarakat Pondok Kresek, atas kerugian moril dan materiil sebagai akibat Peristiwa 5 Juni 2001. Sutrisno yang menyatakan diri sebagai wakil masyarakat

Pondok Kresek, menerima permintaan maaf tersebut. Seterusnya keduanya berharap agar pertikaian dan perselisihan ditinggal di masa silam, dan baik mantan kombatan GAM maupun masyarakat dapat hidup berdampingan dengan rukun, sama seperti yang telah terjadi ratusan tahun lamanya sebelum konflik melanda.

Upacara berbasis tradisi Gayo, Aceh dan Jawa berlangsung khidmat dan penuh haru. Fauzan Azima dan Sutrisno duduk berhadapan seraya berpegangan tangan, sementara seorang tetua agama menyelubungkan kain upuh ulen-ulen ke atas bahu kedua lelaki itu. Seterusnya dibacakan doa dalam bahasa Gayo, serta ikrar yang menyatakan bahwa mulai saat itu Fauzan Azima dan Sutrisno telah menjadi saudara. Sebuah hubungan yang sama berat dan kentalnya dengan saudara kandung. Dalam hal ini, Fauzan Azima memanggil abang kepada Sutrisno, yang lebih tua dari segi usia, sementara Sutrisno memanggil Azima, adik. Keduanya lantas saling menyuapkan ketan kuning, tanda bahwa segala dendam, segala perasaan tak enak, mulai saat itu lebur, hilang untuk selamanya, digantikan dengan hangat dan mesranya pergaulan sesama saudara.

Dalam tradisi Gayo, setelah adat mengangkat saudara demikian, maka mereka yang terikat oleh ikrar itu disatukan oleh tali kekerabatan yang sangat erat. Sebagian orang mengatakan bahwa ikatan itu lebih erat daripada ikatan antara saudara sekandung. Di tanah Gayo, apabila sebuah keluarga mengadakan kenduri, saudara angkat keluarga itu akan bekerja mempersiapkan kenduri dengan intensitas yang jauh lebih tinggi, dibandingkan mereka yang sedarah.

Acara kenduri rekonsiliasi diikuti dengan acara syukuran, makan bersama, dihadiri oleh ratusan masyarakat yang turut merasa lega dan bahagia. Untuk acara hari itu, seekor lembu disembelih. Hidangan yang ada berupa hasil gotong royong masyarakat, sebagai tanda syukur bahwa dendam lama telah dicabut hingga ke akarnya.

Dengan penuh syukur Fauzan Azima menyatakan, ia sangat terharu dapat kembali memasuki desa Sedie Jadi sebagai manusia utuh, dengan hati yang bersih, dan diterima dengan hati yang bersih pula. Saat berpelukan dengan sahabat semasa remajanya, Karyanto, sikap kikuk keduanya tak dapat menyembunyikan rasa yang baru itu, rasa haru dan bersyukur.

Setelah rekonsiliasi berbasis kearifan lokal tersebut, Fauzan Azima dapat datang mengunjungi saudara-saudaranya di Sedie Jadi, pada Hari Raya Idul Fitri. Masyarakat Sedie Jadi tidak akan mempertanyakan kunjungan tersebut, melainkan akan menyambut dengan sukacita, sebagaimana menyambut anggota keluarga yang telah lama pergi merantau. Pulang, kembalilah si anak hilang, kembali ke tengah keluarga.



**Setelah Merpati
Membuat Sarang**
Usaha Merintis Rekonsiliasi

Dua puluh sembilan Maret 2022 menjadi hari bersejarah. Bukan hanya bagi masyarakat Sedie Jadi, yang dulunya bernama Pondok Kresak, bagi Sutrisno, Karyanto atau pun bagi Fauzan Azima. Hari itu dicatat sejarah bangsa, sebagai hari ketika fithrah mengalahkan ego.

Kerja keras selama lebih dari dua tahun, terbayar. Perjalanan panjang selama proses pra-kondisi rekonsiliasi mencatatkan banyak pelajaran. Pelajaran utama dari proses tersebut adalah bahwa pendekatan yang manusiawi dan dilakukan secara terukur serta bertahap, sangat diperlukan bagi tercapainya sukses mempertemukan kedua pihak. Selain itu, bahasa yang terukur, sedapat mungkin bersifat netral, dan menjaga perasaan kedua pihak, adalah alat yang sangat vital dalam proses pendekatan ini.

Fasilitator harus meletakkan tujuan rekonsiliasi sebagai tujuan utama. Dalam prosesnya, fasilitator seringkali dituntut untuk mengenyampingkan kepentingan dirinya, dan mendahulukan kepentingan para pihak. Metode komunikasi yang dipilih harus berupa metode yang dapat diterima oleh semua pihak, serta dilakukan terus menerus secara terukur, dalam waktu yang direncanakan secara patut.

Sangat penting untuk memahami peta kondisi lapangan. Baik terkait kondisi para pihak, maupun yang terkait dengan faktor-faktor eksternal. Dari apa yang tercatat selama proses pra-kondisi, faktor eksternal seperti pergantian pejabat, intervensi kebijakan di tingkat legislatif dan eksekutif, bahkan juga *force majeure* seperti pandemi, adalah sebagian dari faktor luar yang dapat sangat mempengaruhi proses rekonsiliasi.

Faktor lain yang juga harus dipahami adalah latar belakang adat, budaya, kepercayaan dan agama yang berlaku dan dianut para pihak. Pancarona masyarakat di Kecamatan Bukit, yang selama ratusan

tahun menjadi rumah bagi lebih dari tiga etnis, menciptakan kondisi sosial yang sangat khas. Karena kerelaan para pihak untuk terlibat dalam proses rekonsiliasi merupakan salah satu faktor vital, sangat penting untuk menyediakan platform sosio-antropologis yang tepat, yang akan diterima oleh semua pihak.

Keputusan menyelenggarakan kenduri rekonsiliasi Sedie Jadi berbasis kearifan lokal, dengan hasil sebuah prosesi yang merupakan sinkretisme adat Gayo, Aceh dan Jawa, adalah hasil kajian dan diskusi tanpa henti dengan banyak pihak, termasuk para pihak yang terlibat langsung.

Pola pikir manusia sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan tempat dibesarkan, pengalaman, juga agama dan nilai-nilai yang diyakini. Untuk menyamakan persepsi tentang sebuah ritual atau tata cara yang diyakini diperlukan untuk mengubah sifat sebuah keadaan, atau dalam hal ini apa yang menjadi syarat sah rekonsiliasi ditinjau dari budaya setempat, diperlukan pemahaman mendasar tentang nilai-nilai ini. Toleransi serta sikap rendah hati, meletakkan kepentingan orang banyak di atas ego dan kepentingan sendiri, adalah juga faktor yang sangat menentukan.

Keputusan mantan Panglima Wilayah Linge, Fauzan Azima, untuk mengulurkan tangan dan terlibat dalam rekonsiliasi, adalah sebuah keputusan yang sangat bermakna. Di tengah sikap anggota GAM lain yang belum menganggap rekonsiliasi itu penting, Azima menyadari bahwa akar konflik horizontal diantara masyarakat di wilayahnya adalah kecurigaan dan rasa tidak percaya.

Dengan menggunakan Teori Perangkap Thucydides, kita dapat men-erangkan fenomena tentang kebangkitan kekuatan ekonomi etnis Jawa menyebabkan etnis lain, yang secara de facto adalah tuan rumah di dataran tinggi Gayo, merasa gelisah dan curiga. Kondisi ini memu-

dahkan masuknya cara berpikir “uber alles” (keyakinan bahwa bangsa kita memiliki derajat lebih tinggi dari bangsa lain) yang merusak keharmonisan hubungan sosial masyarakat.

Keputusan untuk mengadakan rekonsiliasi berbasis kearifan lokal adalah keputusan yang tepat. Cara ini memberikan penghormatan kepada adat dan budaya semua etnis yang ada di tanah Gayo, Cara ini juga dapat digunakan di tempat lain, bahkan di negara lain. Sebab kearifan lokal adalah produk pengetahuan turun temurun yang diakui kebenarannya oleh anggota suatu budaya, dan merupakan jawaban mereka atas berbagai persoalan hidup yang dihadapi oleh masyarakat budaya tersebut. Dengan demikian, penggunaan elemen kearifan lokal dalam pelaksanaan rekonsiliasi akan lebih menjamin keberhasilan misi dan tujuan rekonsiliasi, dibandingkan dengan penggunaan metode lain.

Faktor tokoh yang mewakili kedua pihak juga tidak dapat diabaikan. Fauzan Azima yang merupakan mantan Panglima Linge serta Sutrisno yang mantan Reje Pondok Kresek, memberikan “badge of authorities” atau “wewenang” pada tindakan mereka, sehingga rekonsiliasi di antara mereka dipandang sah oleh anggota masyarakat. Selain itu, peran dan kehadiran Pemerintah Bener Meriah dalam rekonsiliasi 29 Maret memenuhi peran yang harus disandang Pemerintah dalam syarat rekonsiliasi, memperkuat pesan tentang pentingnya acara ini dalam merawat perdamaian.

Terakhir, kerja KontraS selama dua tahun merintis jalan ke arah rekonsiliasi, sebagian besar dihabiskan dengan “mencari pintu terbuka tempat masuk” yaitu melakukan pemetaan tokoh serta pendekatan step by step dan menerus (kontinyu) pada berbagai pihak. Strategi pendekatan ini ternyata adalah strategi terbaik, dalam rangka mendapatkan kepercayaan (trust) para pihak. Tanpa kepercayaan dari para pihak, kerja merintis rekonsiliasi tak mungkin dilakukan. Oleh

karena itu, pihak fasilitator harus memiliki kemampuan komunikasi dan kepekaan sosial yang tinggi.

Pengetahuan tentang adat budaya setempat juga merupakan bekal penting dalam melakukan kerja-kerja prakondisi rekonsiliasi. Karena itu, bila metode yang diterapkan di Bener Meriah hendak direplikasi di lain tempat, sangat perlu menghadirkan fasilitator yang memahami cara komunikasi sosial dalam budaya setempat.

Setidaknya, kita tak henti berikhtiar, mencari cara terbaik yang mungkin untuk mendekatkan korban dengan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. []

Agih Si Belem Genep *Singe Munge*

Dalam tradisi Gayo, setelah adat mengangkat saudara demikian, maka mereka yang terikat oleh ikrar itu disatukan oleh tali kekerabatan yang sangat erat. Sebagian orang mengatakan bahwa ikatan itu lebih erat daripada ikatan antara saudara sekandung. Di tanah Gayo, apabila sebuah keluarga mengadakan kenduri, saudara angkat keluarga itu akan bekerja mempersiapkan kenduri dengan intensitas yang jauh lebih tinggi, dibandingkan mereka yang sedarah.